

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *INSTITUTIONAL*
REPOSITORY DI UNIVERSTAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

SKRIPSI



**OLEH:
AULIA MI'ROJTIN FIRDAUS
NIM. 19680020**

**PROGRAM STUDI PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *INSTITUTIONAL*
REPOSITORY DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

SKRIPSI

**Oleh:
AULIA MI'ROJTIN FIRDAUS
NIM. 19680020**

**Diajukan kepada:
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Sains dan Informasi (S.S.I)**

**PROGRAM STUDI PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *INSTITUTIONAL REPOSITORY* DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

SKRIPSI

Oleh:

AULIA MI'ROJTIN FIRDAUS

NIM : 19680020

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji:

Tanggal : 22 November 2023

Pembimbing 1



Firma Sahrul Bahtiar, M.Eng

NIP : 198502012019031009

Pembimbing 2



Yulianto, M.Pd.I

NIP : 198707122019031005

Mengetahui,

Ketua Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Dr. Ir. Mokhammad Amin Hariyadi, MT

NIP.196701182005011001

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *INSTITUTIONAL REPOSITORY* DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG





SKRIPSI

Oleh:

AULIA M'ROJTIN FIRDAUS

NIM : 19680020

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi dan dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Sains Informasi (S.S.I) pada tanggal 22 November 2023

	Susunan Dewan Penguji	Tanda Tangan
Ketua Penguji	: <u>Nita Siti Mudawamah. M.IP</u> NIP.199002232018012001	()
Anggota Penguji I	: <u>Dr.Ir. Mokhamad Amin Hariyadi. MT</u> NIP.196701182005011001	()
Anggota Penguji II	: <u>Firma Sahrul Bahtiar. M.Eng</u> NIP.198502012019031009	()
Anggota Penguji III	: <u>Yulianto. M.Pd.I</u> NIP.198707122019031005	()

Mengetahui dan mengesahkan,
Ketua Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Dr. Ir. Mokhamad Amin Hariyadi. MT
NIP.196701182005011001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Mi'rojtin Firdaus

NIM : 19680020

Program Studi : Perpustakaan dan Ilmu Informasi

Fakultas : Sains dan Teknologi

Judul Skripsi : Analisis Implementasi Kebijakan *Institutional Repository* di
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil tulisan saya melalui penelitian dan observasi secara langsung yang telah saya lakukan. Bukan merupakan plagiasi, pengambilan data orang lain, ataupun ide orang lain yang saya akui sebagai tulisan ilmiah saya sendiri. Seluruh data rujukan dan sumber informasi sekunder telah saya cantumkan melalui sitasi dan tertera pada daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Malang, 20 November 2023

Yang membuat pernyataan,



Aulia Mi'rojtin Firdaus

19680020

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Puja dan puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT., atas rahmat, *taufiq* dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Implementasi Kebijakan *Institutional Repository* di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**”. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu izinkan penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sri Harini, M.Si., selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Ir. Mokhammad Amin Hariyadi, M.T., selaku Ketua Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi dan Dosen Penguji II atas bimbingan, kritik, saran dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Bapak Firma Sahrul Bahtiar, M. Eng., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, kritik, saran dan pengarahan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Yulianto, M. Pd.I., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, kritik, saran dan pengarahan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
6. Ibu Nita Siti Mudawamah, M. IP., selaku Dosen Penguji I dan Dosen Wali yang selalu memberikan bimbingan, kritik, saran dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini, serta dukungannya sejak masa awal perkuliahan.
7. Seluruh Dosen dan staf Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, yang telah memberikan ilmu yang melimpah, dukungan, bimbingan dan pengalaman yang bermanfaat.
8. Bapak Mufid, M. Hum., selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan narasumber dalam penelitian ini. Atas bantuannya dalam memberikan izin, meluangkan waktu dan memberikan data untuk penulisan skripsi ini.

9. Untuk yang teristimewa, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis, Ibuk dan Ayah. Atas doanya yang tidak pernah putus, atas kasih sayang dan cintanya sepanjang hidup penulis dan atas pengorbanannya. Terima kasih juga atas dukungan baik moril maupun materi yang tidak pernah berhenti hingga saat ini.
10. Kedua adik penulis, Nisa dan Wilda yang telah memberikan dukungan. Semoga dapat menjadi contoh baik dan menjadi motivasi untuk menyelesaikan pendidikan.
11. Keluarga di Bandung atas dukungan dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
12. Sahabat penulis sejak SMA, Meisya Luthfia Putri dan Wanodya Gute U. A. yang selalu mendengarkan curhatan, keluhan, dan cerita penulis dalam keadaan senang dan sedih. Terima kasih atas doa, dukungan dan keyakinan bahwa penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Alia, Azhar, Ayu, Ferika, Uci, Nanda, Naura, Alfin, Bandi, Upi, Adi, Naufal, dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas tawa, dukungan dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga saat ini.
14. Teman KKM 2021 Qonita dan Fatus yang telah membantu, mendengarkan keluh kesah penulis dan memberikan dukungan sehingga penulis dapat bertahan dalam semester-semester akhir perkuliahan.
15. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang belum dapat penulis sebutkan satu persatu.
16. Terakhir adalah untuk diri penulis, terima kasih karena terus yakin dan berjuang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini karena keterbatasan kemampuan dan ilmu yang penulis miliki. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan sedikit pengetahuan bagi yang membacanya. *Aamiin Ya Rabbal'alamiin.*

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Malang, 17 November 2023
Penulis,
Aulia Mi'rojtin Firdaus

MOTTO

“Girls should never be afraid to be smart”

(Emma Watson)

“Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir, et l’envie furieuse d’en réaliser quelques uns.”

(Jacques Brel)

3.6.	Instrumen Penelitian	41
3.7.	Teknik Pengumpulan Data	42
3.8.	Analisis Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		47
4.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
4.1.1.	Sejarah Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	47
4.1.2.	Visi dan Misi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	48
4.1.3.	Tugas Pokok dan Fungsi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.....	48
4.1.4.	Struktur Organisasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.....	49
4.2.	Hasil Penelitian.....	50
4.2.1.	Implementasi Kebijakan <i>Institutional Repository</i> di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.....	50
4.2.2.	Tantangan dalam Implementasi Kebijakan	65
4.3.	Pembahasan	68
4.4.	Implementasi Kebijakan <i>Open Access</i> pada <i>Institutional Repository</i> dan korelasinya dengan Sains dan Islam.....	75
4.4.1.	Kebijakan Open Access pada <i>Institutional Repository</i> dalam Perspektif Sains dan Islam	75
4.4.2.	Hukum Menganalisis Implementasi Kebijakan dalam Perspektif Islam.....	77
BAB V PENUTUP		79
5.1.	Kesimpulan.....	79
5.2.	Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....		82
LAMPIRAN.....		85

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu	11
Tabel 3. 1 Kisi-kisi Wawancara.....	42
Tabel 4. 1 Jenis Institutional Repository UIN Maulana Malik Ibrahim.....	55
Tabel 4. 2 Perkembangan Kebijakan IR UIN Maulana Malik Ibrahim.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Diagram Siklus Kebijakan (Policy Cycle)	21
Gambar 3. 1 Alur Penelitian	38
Gambar 3. 2 Komponen Analisis Data Model Interaktif	46
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim.....	50
Gambar 4. 2 Pedoman Unggah Mandiri IR UIN Maulana Malik Ibrahim	72
Gambar 4. 3 Ranking Webometrics IR UIN Maulana Malik Ibrahim	73

ABSTRAK

Firdaus, Aulia Mi'rojtin. 2023. **Analisis Implementasi Kebijakan *Institutional Repository* di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi. Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.**

Pembimbing: (I) Firma Sahrul Bahtiar, M.Eng., (II) Yulianto, M.Pd.I.

Kata Kunci: Kebijakan, *Institutional Repository*, *Open Access*, UIN Malang

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim adalah salah satu perguruan tinggi yang menerapkan kebijakan *open access* pada *institutional repository*nya. Penerapan kebijakan ini tentu tidak mudah dan membutuhkan pertimbangan agar implementasinya dapat mencapai tujuan yang selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses implementasi kebijakan *institutional repository* di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, serta mengetahui tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa telah dilakukan proses perumusan hingga implementasi kebijakan *institutional repository* oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Implementasi kebijakan *open access* pada *institutional repository* di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sendiri sudah berjalan sejak tahun 2015 hingga saat ini. Implementasi kebijakan *institutional repository* di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang juga menghadapi tantangan. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah mengembangkan platform *institutional repository* yang *sustainable* dan dapat terintegrasi dengan indeks *database institutional repository*.

ABSTRACT

Firdaus, Aulia Mi'rojtin. 2023. *Analysis of Institutional Repository Policy Implementation at Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*. Thesis. Library and Information Science Study Program, Faculty of Science and Technology, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Supervisors: (I) Firma Sahrul Bahtiar, M.Eng., (II) Yulianto, M.Pd.I.

Keywords: *policy, institutional repository, open access, UIN Malang*

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang is one of the universities which implements an open access policy in its institutional repository. Implementing this policy is certainly challenging and requires consideration in order to achieve goals that are in line with the vision and mission of university. This research aims to find out and describe the implementation process of the institutional repository policy at the Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, as well as knowing the challenges faced in the process of implementing this policy. This research was carried out using qualitative methods. The results of this research found that the policy formulation and implementation process had been executed. The implementation of the open access policy in the institutional repository at the Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang itself has been running since 2015 up until now. The implementation of the institutional repository policy at the Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang also faces challenges. Currently the challenge faced is best way to developing a sustainable institutional repository platform and be able to integrated with institutional repository database indexes.

مستخلص البحث

فردوس، أوليا معرج، 2023. *التحليل المؤسسي مستودع تنفيذ السياسات في جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج*. البحث الجامعي. دراسة علوم المكتبات والمعلومات، كلية العلوم و التكنولوجيا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف 1: فرما سهر البهتير، الماجستير، المشرف 2: يوليانتو، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: مستودع، تنفيذ السياسات، افتتاح الوصول، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج

الدولة الإسلامية في جامعة مولانا مالك إبراهيم هي واحدة من الجامعات التي تنفذ سياسات في المستودعات المؤسسية. تنفيذ هذه السياسة هو ليس سهلا ويتطلب النظر بحيث يمكن تنفيذها لتحقيق الأهداف التي تتماشى مع رؤية ورسالة الجامعة. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد وتحليل المؤسسية مستودع عملية تنفيذ سياسة الدولة الإسلامية في جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج، وكذلك لتحديد التحديات التي تواجهها في تنفيذ السياسات العملية. جرت هذه الدراسة باستخدام الأساليب النوعية مع هدف أخذ العينات وتقنيات بهدف معرفة في التفاصيل المتعلقة بموضوع الدراسة. نتائج هذه الدراسة وجدت أن عملية صياغة وتنفيذ السياسات قد نفذت تنفيذ العديد من السياسات على المستودع المؤسسي في الدولة الإسلامية جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج. قد تم تشغيل منذ عام 2015 حتى الآن. الأول، التحديات التي تواجهها في تنفيذ المؤسسية مستودع السياسة في الدولة الإسلامية جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج هو الخوف من ظاهرة الانتحال. التحدي الذي يواجه اليوم لم يعد الخوف من ظاهرة الانتحال. التحدي الذي نواجهه اليوم هو تطوير مؤسسي مستودع منصة هذا هو *المستدامة* و يمكن أن تكون متكاملة مع مجلة قاعدة بيانات الفهرس.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang terjadi secara masif juga memberikan dampak signifikan pada perpustakaan, seperti yang terjadi pada perpustakaan perguruan tinggi. Salah satu implementasi dari perkembangan perpustakaan perguruan tinggi ini adalah penyediaan layanan *institutional repository*. Wajah layanan *institutional repository* saat ini mulai berubah menuju keterbukaan layanan dengan tujuan untuk menjangkau *audience* atau pembaca yang lebih luas. Selain itu keterbukaan akses ini dimaksudkan untuk menghapuskan kesenjangan dalam bidang akademik. Kesenjangan akademik ini terjadi karena keterbatasan akses pada sumber informasi ilmiah yang disebabkan adanya biaya berlangganan. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Bashir, *et. al.* (2021) menyatakan bahwa istilah *institutional repository*, *green open access*, *open access repository* merupakan beberapa kata kunci yang sering diketikkan dan ditemukan dalam pangkalan data sistem temu kembali artikel ilmiah.

Istilah *institutional repository* ini muncul seiring berkembangnya layanan perpustakaan digital yang merupakan hasil dari perkembangan teknologi informasi. Jones, *et. al.* (2006) menyatakan dalam bukunya bahwa ketika membicarakan tentang *institutional repository*, maka kata '*institutional*' merujuk pada institusi pendidikan atau lembaga riset yang merupakan induk dari sebuah perpustakaan. *Institutional Repository* atau simpanan kelembagaan menurut Pendit (2008) merujuk pada kegiatan penghimpunan dan pelestarian koleksi digital yang merupakan hasil karya intelektual dari sebuah komunitas tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *institutional repository* adalah sarana menghimpun dan melestarikan materi digital berupa karya intelektual melalui proses preservasi digital. Perkembangan *institutional repository* juga sering kali dikaitkan dengan kesadaran akan *Open Archive Initiative* (OAI). OAI memungkinkan diseminasi informasi secara lebih luas dan membantu dalam upaya komunikasi ilmiah yang baik.

Pendit (2008) juga menjabarkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan diseminasi informasi secara digital ini juga memicu inisiasi lahirnya gerakan akses terbuka atau *Open Access Movement*. Suber (2010) menyatakan bahwa *Open Access* adalah literatur yang tersedia secara digital, luring, bebas biaya berlangganan, dan biasanya bebas dari sebagian besar hak cipta atau pembatasan lisensi. Pernyataan ini juga senada dengan yang dikemukakan Bjork dalam Shah (2019) bahwa “*Open Access means that a reader of a scientific publication can read it over the Internet, print it out and even further distribute it for non-commercial purposes without any payment or restrictions*”.

Prinsip utama *Open Access* adalah diseminasi informasi secara luas dan kemudahan akses pada hasil riset dan terbitan ilmiah. Veltrophas dalam Ejikeme & Ezema (2019) mengakui bahwa *Open Access* meningkatkan efisiensi dalam temuan ilmiah karena kemungkinan pemborosan sumber daya dan waktu penyelidikan akan sumber yang sama menjadi berkurang ketika peneliti memiliki akses komprehensif pada hasil penelitian sebelumnya. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *Open Access* seharusnya dapat diterapkan oleh *institutional repository* agar informasi yang terdapat di dalamnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh kalangan akademik dan masyarakat secara luas.

Prinsip *Open Access* pada *institutional repository* ini tidak serta-merta diterapkan tanpa adanya wewenang ataupun kebijakan dari *stakeholder* atau kepala perpustakaan terkait. Wahab (2021) dalam bukunya menyatakan bahwa penyusunan kebijakan secara normatif bersifat *problem solving* atau pemecahan masalah. Hal ini berarti setiap kebijakan sejatinya dimaksudkan untuk memecahkan masalah. Lebih lanjut juga dijabarkan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Pembuatan sebuah kebijakan pasti berlandaskan pada aspek tertentu yang melatarbelakanginya, baik untuk mencapai visi perguruan tinggi terkait ataupun untuk melaksanakan tujuan dari pembuat kebijakan itu sendiri untuk kemajuan perpustakaan. Latar belakang penyusunan kebijakan pada perpustakaan perguruan

tinggi ini tentu pula berbeda-beda. Hal ini disesuaikan dengan visi, misi dan tujuan dari masing-masing perpustakaan dan perguruan tinggi terkait. Easton dalam Utomo (2021) menyatakan bahwa pembuatan kebijakan sejatinya berlandaskan pada perilaku politik untuk mengalokasikan nilai-nilai secara sah (*authoritative allocation of values*). Nilai-nilai yang dialokasikan dalam hal ini adalah tujuan untuk kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat. Pernyataan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran dalam Surah Hūd ayat 6 bahwa:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Artinya: Tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauhulmahfuz).

Tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia (2023) menjabarkan bahwa tidak satu pun makhluk bergerak dan bernyawa, yang melata, merayap atau berjalan di muka bumi ini melainkan semuanya telah dijamin Allah rezekinya. Semua makhluk itu diberi naluri dan kemampuan untuk mencari rezeki sesuai dengan fitrah kejadiannya. Dia mengetahui tempat kediamannya ketika hidup di dunia dan mengetahui pula tempat penyimpanannya setelah mati. Semua itu sudah tertulis dan diatur serapi-rapinya dalam Kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz, perihal perencanaan dan pelaksanaan dari seluruh ciptaan Allah secara menyeluruh dan sempurna. Berdasarkan tafsir Surah Hūd ayat 6 dapat disimpulkan bahwa Allah SWT merencanakan dan melaksanakan kehidupan makhluknya dengan menyeluruh dan sempurna sehingga memberikan manfaat atau kemaslahatan bagi makhluknya. Melalui ayat ini dapat diambil pelajaran bahwa seorang pemimpin selaku pembuat dan *implementator* kebijakan hendaknya merumuskan kebijakan dengan tujuan untuk kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya.

Faktor lain selain tujuan yang ingin dicapai oleh perpustakaan dan perguruan tinggi adalah nilai. Pakar politik Harold Lasswell dan filsuf Abraham Kaplan dalam Dye (1978) mendefinisikan kebijakan sebagai program yang memproyeksikan tujuan, nilai dan praktik. Pada penyusunan dan implementasi kebijakan *institutional repository* di perpustakaan perguruan tinggi tentu memiliki nilai-nilai yang

berpengaruh terhadap kebijakan yang telah dibuat. Pratama (2018) menyatakan bahwa nilai-nilai ini digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi suatu kebijakan sehingga dapat diketahui dampak dari adanya kebijakan tersebut.

Kebijakan *Open Access* pada *institutional repository* ini belum diimplementasikan pada semua perpustakaan perguruan tinggi, terlebih pada koleksi berjenis skripsi, tesis dan disertasi. Data Garba Rujukan Digital atau GARUDA menyatakan dari total 3.631 *repository* yang terindeks, *institutional repository* milik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim adalah salah satu yang menerapkan kebijakan *Open Access*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim sudah menerapkan kebijakan *open access* pada *institutional repository*nya sejak tahun 2015. Koleksi berjenis skripsi, tesis dan disertasi dapat diakses secara terbuka melalui situs web. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti data pada Webometrics menunjukkan bahwa situs web milik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mendapatkan peringkat ke 76 di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi penilaian adalah media publikasi daring, satu di antaranya adalah *institutional repository* yang dimiliki suatu perguruan tinggi. Peringkat ini dinilai berdasarkan beberapa indikator, di antaranya visibilitas yaitu pengaruh konten situs web, transparansi atau keterbukaan yaitu peneliti yang banyak dikutip dan keunggulan yaitu jurnal atau artikel jurnal yang banyak dikutip.

Penerapan kebijakan *Open Access* sendiri tentu tidak mudah, butuh pertimbangan dan perencanaan yang matang agar kebijakan tersebut dapat membantu pelaksanaan visi dan misi perguruan tinggi. Utamanya dalam hal ini adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi. Berdasarkan kondisi tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait implementasi kebijakan *institutional repository* di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui problematika dan tantangan dari penerapan kebijakan *institutional repository* di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan *institutional repository* di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang?
2. Apa tantangan dari penerapan kebijakan *institutional repository* di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan *institutional repository* pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan tantangan dari penerapan kebijakan *institutional repository* pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dan praktis baik bagi peneliti ataupun pihak-pihak yang bersangkutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap implementasi kebijakan *institutional repository* serta menjadi sumber informasi ataupun acuan terhadap pihak lain yang ingin melakukan penelitian di masa mendatang. Selain itu juga hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan pertimbangan bagi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim terkait implementasi kebijakan *institutional repository*.

1.5. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada penelitian Analisis Implementasi Kebijakan *Institutional Repository* di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang meliputi:

1. Penelitian ini tidak meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan *institutional repository* pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.;
2. Penelitian ini hanya meneliti dampak implementasi kebijakan *institutional repository* yang dialami oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.; dan
3. Penelitian ini meneliti kebijakan *open access* pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab satu berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua berisi penelitian-penelitian terdahulu beserta teori yang menjadi tinjauan dan dasar dari penelitian ini. Pada bab ini terdapat 5 (lima) penelitian terdahulu dengan topik yang relevan dengan penelitian ini, pengertian dari perpustakaan perguruan tinggi, pengertian *institutional repository*, pengertian dan teori tentang kebijakan, pengertian mengenai *open access*, *partial access* dan *closed access*.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga berisi uraian terkait rancangan, alur, dan alat penelitian. Secara detail, bab ini berisikan jenis penelitian, alur penelitian, waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, instrumen penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

d. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab keempat diawali dengan deskripsi objek yang diteliti. Kemudian disampaikan uraian pembahasan dan pemaknaan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap subjek penelitian.

e. **BAB V PENUTUP**

Pada bab terakhir ini berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini diperoleh dari hasil penggalian informasi dari penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan adalah penelitian yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Adapun karya ilmiah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Rujukan pertama adalah artikel jurnal dengan judul “Kebijakan Akses Terbuka (*Open Access*) Terhadap Layanan Repositori Institusi” oleh Oktavia (2019). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka dan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi serta analisis isi. Hasil penelitian ini memberikan solusi dalam menetapkan kebijakan akses informasi terbuka untuk layanan *institutional repository*, yaitu dengan memberikan hak eksklusif kepada penulis. Di sisi lain penulis juga dapat menyebarkannya sendiri. Kebijakan selanjutnya adalah pemilik pertama hak cipta atas karya ilmiah tetap berada di tangan penulis, kecuali dengan kondisi telah dialihkan kepada universitas terkait atau kontrak pendanaan yang dapat mengklaim kepemilikan. Saat ini, banyak perguruan tinggi dan lembaga penelitian yang menerima akses terbuka sebagai kebijakan yang mengharuskan penyimpanan karya ilmiah dalam sistem repositori akses terbuka.

Rujukan kedua adalah artikel jurnal berjudul “*The Potentials of Open Access Initiative and the Development of Institutional Repositories in Nigeria: Implications for Scholarly Communication*” oleh Ejikeme & Ezema (2019). Studi ini meneliti kondisi akses terbuka pada *institutional repository* di Nigeria. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa Nigeria memiliki 20 (dua puluh) *institutional repository* dari 14 (empat belas) dari sekitar 153 (seratus lima puluh tiga) perguruan tinggi. Mayoritas *institutional repository* dikelola dengan menggunakan perangkat lunak *DSpace*. Penelitian ini juga menyatakan bahwa adanya kelambatan dalam pertumbuhan *institutional repository* di Nigeria. Selain itu konten dari *institutional*

repository yang ada di Nigeria didominasi oleh artikel jurnal, tesis serta disertasi. Penelitian ini juga mengungkap kelemahan perguruan-perguruan tinggi di Nigeria dalam mengeksplorasi potensi *institutional repository* dalam diseminasi yang lebih luas akan produk ilmiahnya. Keadaan ini menjadi tantangan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mengembangkan kerangka kerja berkelanjutan pada perkembangan *institutional repository* di negara tersebut.

Rujukan ketiga adalah artikel *proceeding* dengan judul “*Intitutional Repository Access Policy in Public University Libraries in Central Jawa, Indonesia*” oleh Handoyo dan Istiarni (2020). Penelitian ini membahas kebijakan akses pada repositori yang dikembangkan oleh perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah yang notabene masih melindungi hak kekayaan intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dalam repositori dan implementasinya, serta pandangan pemangku kebijakan dalam mengakses repositori. Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan metode deskriptif dengan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner yang didistribusikan pada responden, serta menggunakan studi kepustakaan untuk mendukung penelitian ini. Sampel responden diambil dari 10 (sepuluh) perpustakaan perguruan tinggi negeri yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa perpustakaan perguruan tinggi negeri yang ada di Jawa Tengah memiliki koleksi repositori institusi yang berisi karya ilmiah berupa skripsi, tesis, disertasi dan artikel ilmiah. Kebijakan repositori institusi yang diterapkan pada masing-masing perguruan tinggi negeri ini juga beragam, mulai dari akses terbuka, akses terbuka sebagian (*partial access*) dan akses tertutup. Penerapan kebijakan repositori institusi ini diperkuat dengan payung hukum berupa Surat Keputusan (SK) Rektor, *Standar Operating Procedure* (SOP) atau kebijakan lainnya yang sesuai.

Artikel jurnal berjudul “*Centering Accessibility: A Review of Institutional Repository Policy and Practice*” oleh Anderson & Leachman (2020). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara mendalam terkait implementasi aksesibilitas pada *institutional repository*. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa survei. Survei dilakukan dengan kuesioner berisi lima pertanyaan pilihan ganda dan dua pertanyaan terbuka

yang disebarakan melalui tautan anonim. Objek dari penelitian ini adalah pengelola *institutional repository* di empat situs yaitu *the Orbis Cascade Alliance* yang merupakan konsorsium perpustakaan akademik di Pasific Northwest Amerika Serikat, *Association of College and Research Libraries (ACRL)*, *Internasional Federation of Library Association and Institutions (IFLA-I)*, dan *Digital Commons IR Managers*. Hasil dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pengelola *institutional repository* sudah mengetahui pentingnya aksesibilitas dalam *institutional repository*. Namun pada implementasinya, hanya sedikit kebijakan dan praktik aksesibilitas yang diterapkan. Faktor penghambatnya di antaranya adalah kurangnya sumber daya pada institusi, kurangnya waktu, kurangnya pelatihan intensif dan pembatasan pada bahan pustaka. Melalui penelitian ini peneliti ingin menekankan bahwa aksesibilitas harus menjadi prioritas dalam penyusunan kebijakan *institutional repository* dan alokasi bahan pustaka di masa mendatang.

Rujukan kelima adalah artikel jurnal oleh Safira (2020) yang berjudul “Kebijakan *Open Access* Repositori Institusi di Perpustakaan Perguruan Tinggi: Kajian *Best Practice* Studi Literature”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan keterbukaan akses pada repositori institusi beserta peluang dan tantangannya. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perpustakaan perguruan tinggi belum memiliki kebijakan keterbukaan akses secara formal. Utamanya adalah kebijakan preservasi konten dan kebijakan hak cipta. Sedangkan peluang keterbukaan akses ini merupakan poin penting untuk dapat meningkatkan persentase kegunaan publikasi ilmiah dan tantangannya berupa sumber daya serta komitmen dari seluruh sivitas akademika untuk berkontribusi.

Penelitian-penelitian tersebut di atas memiliki tema yang serupa yaitu kebijakan *open access* pada *institutional repository*. Rujukan penelitian ini tentu memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti terkait kebijakan *institutional repository* pada perguruan tinggi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian

saat ini terdapat pada objek penelitian yaitu Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Informasi yang lebih jelas dan detail mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi rujukan peneliti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Oktavia (2019)	Kebijakan Akses Terbuka (<i>Open Access</i>) Terhadap Layanan Repositori Institusi	Menganalisis solusi untuk mengembangkan kebijakan akses terbuka dalam suatu <i>institutional repository</i> .	Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan analisis isi.	Pemilik pertama hak cipta atas karya ilmiah seharusnya tetap berada pada penulis. Kecuali dengan kondisi khusus tertentu seperti adanya pengalihan kuasa terhadap universitas atau institusi terkait, atau adanya kontrak pendanaan yang dapat mengklaim kepemilikan karya ilmiah.
2.	Ejikeme & Ezema (2019)	<i>The Potentials of Open Access Initiative and the Development of Institutional Repositories in Nigeria: Implications for Scholarly Communication</i>	Mengetahui kondisi akses terbuka pada <i>Institutional Repository</i> di Nigeria.	Metode penelitian menggunakan tinjauan literatur ekspositori dengan metode ekstraksi data berupa infometrik deskriptif.	Terdapat 20 <i>Institutional Repository</i> dari 14 perguruan tinggi dari sekitar 153 perguruan tinggi di Nigeria. Disimpulkan bahwa adanya kelambatan pertumbuhan <i>Institutional Repository</i> di Nigeria.

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Handoyo dan Istiarni (2020)	<i>Intitutional Repository Access Policy in Public University Libraries in Central Jawa, Indonesia</i>	Menganalisis kebijakan <i>institutional repository</i> , hambatan dalam implementasinya, dan pandangan pemangku kebijakan akan implementasi akses terbuka pada <i>institutional repository</i> pada Perguruan Tinggi Negeri di Jawa Tengah.	Penelitian menggunakan paradigma kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner pada 10 Perguruan Tinggi Negeri di Jawa Tengah.	Hasilnya berupa identifikasi isi <i>institutional repository</i> . Adanya kebijakan yang beragam, mulai dari <i>open access</i> , <i>partial access</i> , hingga <i>closed access</i> . Adanya payung hukum seperti Surat Keterangan Rektor (SK) dan <i>Standar Operational Procedure</i> (SOP).
4.	Anderson dan Leachman (2020)	<i>Centering Accessibility: A Review of Institutional Repository Policy and Practice</i>	Memahami implementasi aksesibilitas dalam kaitannya dengan <i>institutional repository</i> .	Penelitian dilakukan dengan paradigma kuantitatif menggunakan survei pada pengelola <i>institutional repository</i> .	Meski pengelola mengetahui tentang pentingnya aksesibilitas <i>institutional repository</i> , hanya sedikit dari kebijakan dan praktik yang diterapkan untuk memastikan akses ke dalam <i>institutional repository</i> ini berjalan dengan baik. Hambatan utamanya adalah kurangnya sumber daya, waktu dan pelatihan.

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
5.	Safira (2021)	Kebijakan <i>Open Access</i> Repositori Institusi di Perpustakaan Perguruan Tinggi: Kajian <i>Best Practice</i> Studi Literature	Mengidentifikasi kebijakan keterbukaan akses <i>institutional repository</i> di Perguruan Tinggi serta peluang dan tantangannya.	Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif.	Hasilnya adalah sebagian besar Perguruan Tinggi belum memiliki kebijakan akses terbuka secara formal. Khususnya kebijakan terkait preservasi dan hak cipta. Sedangkan peluang akses terbuka ini sangat besar untuk meningkatkan persentase kegunaan publikasi ilmiah dan tantangannya adalah sumber daya serta komitmen dari seluruh sivitas akademika untuk berkontribusi.

2.2. Landasan Teori

Sugiyono (2022) menyatakan landasan teori adalah seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Haditono dalam Sugiyono (2022) menyatakan bahwa suatu teori akan memperoleh arti yang penting jika dapat lebih melukiskan, menerangkan dan meramalkan gejala yang ada.

2.2.1. Perpustakaan Perguruan Tinggi

Perpustakaan merupakan sebuah institusi penyedia informasi yang keberadaannya tidak dapat dipungkiri oleh manusia. Menurut Obi (2021) dalam Okwu (2022) perpustakaan dideskripsikan dengan definisi yang beragam, mulai dari gudang ilmu pengetahuan, detak jantung pendidikan, benteng pengetahuan, repositori kebudayaan, lembaga sosial dan pusat informasi. Berdasarkan definisi tersebut perpustakaan dapat menjadi sebuah institusi yang aktif berperan dalam transformasi masyarakat. Terlebih lagi dengan berkembangnya teknologi informasi

yang memberikan kemudahan dalam aksesibilitas maupun konstruksi sistem penyebaran informasi, sehingga diharapkan dapat menghantarkan informasi yang optimal bagi masyarakat luas.

Perkembangan perpustakaan ini sesuai dengan salah satu dari lima hukum ilmu perpustakaan oleh Ranganathan (1931) yaitu *the library is growing organism* yang dalam bahasa Indonesia berarti perpustakaan merupakan sebuah organisme yang tumbuh. Pernyataan ini diperkuat oleh Okwu (2022) bahwa perkembangan perpustakaan bergantung pada perubahan dinamis pada masyarakat. Perpustakaan diharapkan dapat berkembang dalam aspek *readership* (jumlah pembaca), staf, sumber informasi dan ketersediaan layanan.

Perkembangan pada perpustakaan ini salah satunya juga dipicu oleh pertumbuhan penggunaan teknologi informasi yang menurut Datareportal.com pada paruh awal tahun 2023 ini mencapai 212,9 (dua ratus dua belas koma sembilan) juta pengguna. Sedangkan total populasi penduduk Indonesia sendiri adalah 276,4 (dua ratus tujuh puluh enam koma empat) juta. Lembaga analisis *Kepios* menilai jumlah ini meningkat 10 (sepuluh) juta atau 5,2% (lima koma dua persen) lebih banyak daripada tahun 2022.

Perkembangan perpustakaan juga harus diterapkan pada perpustakaan perguruan tinggi. Pasal 24 ayat 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengamanatkan pada setiap perguruan tinggi untuk menyelenggarakan perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Perpustakaan. Standar ini terdiri atas standar koleksi perpustakaan, standar sarana dan prasarana, standar pelayanan perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan dan pengelolaan. Standar ini menjadi acuan baik bagi perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Perpustakaan perguruan tinggi sendiri acap kali diibaratkan sebagai jantungnya perguruan tinggi (*the heart of university*). Darwanto, *et.al.* (2015) menyatakan bahwa Perpustakaan perguruan tinggi merupakan unit pelaksana teknis (UPT) yang bersama-sama dengan unit lain dalam melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi melalui menghimpun, memilih, mengolah, merawat serta

melayankan sumber informasi kepada lembaga induk dan masyarakat akademis. Melalui pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa perpustakaan perguruan tinggi diselenggarakan dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan program perguruan tinggi yang sesuai dengan Tri Dharma perguruan tinggi, di antaranya adalah pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yuventia (2012) menyatakan dalam artikelnya bahwa penjabaran pelaksanaan perpustakaan perguruan tinggi sesuai dengan Tri Dharma adalah sebagai berikut:

1. Sebagai penunjang pendidikan dan pengajaran maka perpustakaan perguruan tinggi bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menyajikan dan menyebarluaskan informasi untuk mahasiswa dan dosen sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
2. Sebagai penunjang penelitian maka perpustakaan perguruan tinggi diharapkan mampu mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menyajikan dan menyebarluaskan informasi yang berguna bagi peneliti baik dari dalam institusi ataupun luar institusi; serta
3. Sebagai penunjang pengabdian kepada masyarakat perpustakaan perguruan tinggi mampu melakukan kegiatan dengan mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menyajikan dan menyebarluaskan informasi bagi masyarakat.

Oktavia (2019) menyatakan bahwa perpustakaan perguruan tinggi telah memainkan peran penting dalam proses komunikasi ilmiah selama 150 tahun terakhir. Peran ini didorong oleh gerakan *open access* untuk diseminasi dan promosi karya komunitas penelitian ilmiahnya sendiri. Das dalam Handoyo & Istiarni (2020) menyatakan bahwa perpustakaan perguruan tinggi mempunyai empat fungsi. Fungsi-fungsi tersebut di antaranya adalah:

1. Pengumpulan dan penyebaran informasi;
2. Layanan informasi;
3. Pusat literasi dalam konteks akademik; dan
4. Repositori dari berbagai penelitian.

Fungsi repositori dari berbagai penelitian ini kemudian dijabarkan kembali yaitu perpustakaan perguruan tinggi merupakan sarana penghimpun atau repositori

informasi yang disimpan untuk digunakan oleh generasi saat ini ataupun generasi di masa mendatang. Pernyataan ini juga senada dengan pendapat Pamungkas, *et.al.* (2020) bahwa sebagai penunjang penerapan Tri Dharma, perpustakaan dalam lingkup perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai *repository* publikasi karya ilmiah yang telah dihasilkan.

2.2.2. Institutional Repository

Fenomena *institutional repository* ini acap kali dikaitkan dengan Inisiatif Pengarsipan Terbuka atau *Open Archive Initiative* (OAI). Warner (2003) menyatakan Inisiatif ini merebak pada akhir era 1990-an tepatnya pada tahun 1999 di forum *Santa De Universal Preprint Service meeting*. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk mengembangkan komunikasi ilmiah melalui interoperabilitas yang lebih baik antara *e-print* dengan arsip.

Institutional repository merupakan salah satu produk perpustakaan digital. Perpustakaan digital ini bukan semata kumpulan koleksi bahan pustaka berformat digital. Menurut Jones, dkk. (2006) perpustakaan digital adalah kebijakan sebagai perpustakaan adalah yang utama. Lebih lanjut dideskripsikan sebagai perpustakaan akademik atau riset yang diorganisasikan untuk kebutuhan pengembangan manusia. Ulum & Setiawan (2016) menyebutkan bahwa metode diseminasi informasi yang dilakukan perpustakaan pada mulanya berupa katalog daring dan perpustakaan digital, namun seiring berkembangnya teknologi informasi layanan diseminasi juga berkembang dengan fungsi tambahan sebagai *institutional repository*.

Repository sendiri dideskripsikan Reitz (2002) dalam *Online Dictionary of Library and Information Science* sebagai sebuah gedung atau ruangan yang difungsikan baik permanen atau sementara sebagai tempat untuk penyimpanan material yang diarsipkan. Material ini dapat berupa manuskrip, buku langka, dokumen pemerintahan, makalah, foto atau lain sebagainya. Fungsi *repository* adalah untuk preservasi dan melindungi koleksi yang diarsipkan. *Repository* yang modern dilengkapi fasilitas sesuai dengan standar kontrol lingkungan dan keamanan yang berlaku. Perihal akses baik terbuka ataupun tertutup sepenuhnya diserahkan pada kebijakan institusi induknya.

Sutedjo dalam Novianto (2020) menyatakan bahwa *institutional repository* merupakan sebuah ruang arsip secara daring untuk mengumpulkan, melestarikan dan menyebarluaskan salinan digital karya ilmiah-intelektual dari sebuah lembaga, salah satunya adalah perguruan tinggi. Terdapat setidaknya tiga manfaat dari *institutional repository*, di antaranya adalah:

1. Sebagai pengumpul karya ilmiah atau karya intelektual dalam satu tempat. Hal ini berguna untuk kemudahan dalam temu kembali dan pengindeksan oleh mesin pencari;
2. Sebagai sarana promosi perpustakaan dan institusi, yang dalam hal ini adalah perguruan tinggi; dan
3. Sebagai alat atau *tools* untuk diseminasi karya ilmiah sivitas akademik dengan tempat dan waktu yang tidak terbatas.

Berdasarkan sumber lain, Ulum & Setiawan (2016) menjabarkan bahwa perkembangan *institutional repository* ini setidaknya dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama adalah upaya untuk melestarikan kekayaan intelektual dan *local content* yang dimiliki oleh sebuah institusi. Kemudian upaya untuk membuka akses informasi untuk jangkauan yang lebih luas dengan adanya perkembangan teknologi informasi. Serta adanya kesadaran dari pemilik karya ilmiah untuk berbagi informasi dengan orang lain. berdasarkan faktor pertama tersebut maka perpustakaan perguruan tinggi membutuhkan seperangkat kebijakan sebagai landasan dan payung hukum untuk menerapkan sistem *institutional repository*-nya. Faktor kedua adalah adanya kompetisi pada pemerinkatan *web of repository* atau yang lebih dikenal dengan *Webometrics*. Pemerinkatan ini diselenggarakan oleh *The Cybermetrics Lab*. Sistem pemerinkatan ini mengidentifikasi *institutional repository* berdasarkan indikator berupa *size*, *visibility*, *almetrics*, *rich files* dan *scholar*.

2.2.3. Kebijakan

Kebijakan sejatinya memiliki banyak definisi. Menurut Pal dalam Widodo (2021) untuk mendeskripsikan konsep kebijakan dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Kelompok pertama adalah pengertian berdasarkan maksud dan tujuan

sebagai acuan kriteria kebijakan. Kelompok kedua adalah pengertian yang menekankan pada aspek dampak dari implementasi kebijakan tersebut. Beberapa pakar politik mendeskripsikan kebijakan dalam beberapa definisi, di antaranya:

1. Jenkins dalam Widodo (2021) menyatakan bahwa kebijakan adalah: “*a set of interrelated decisions taken by political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decision should, in principle, be within the power of these actors to achieve.*”

Pernyataan Jenkins ini dapat diartikan sebagai seperangkat keputusan yang saling terkait yang diambil oleh individu atau kelompok politik mengenai pemilihan tujuan dan cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu, di mana keputusan tersebut pada prinsipnya harus berada dalam kekuasaan individu tersebut untuk mencapainya.

2. Knoepfel (2007) dalam Wahab (2021) juga menyatakan definisi serupa terkait kebijakan. Menurutnya kebijakan adalah: “*a series of decisions or activities resulting from structured and recurrent interactions between different actors, both public and private, who are involved in various different ways in the emergence, identification and resolution of a problem defined politically as a public one.*”

Pengertian tersebut memiliki arti serangkaian keputusan atau kegiatan yang dihasilkan dari interaksi terstruktur dan berulang antara aktor yang berbeda, baik publik maupun swasta, yang terlibat dalam berbagai cara yang berbeda dalam kemunculan, identifikasi dan penyelesaian masalah yang didefinisikan secara politis sebagai masalah publik.)

3. Dye (2013) dalam Suaib, *et.al.* (2022) menyatakan bahwa kebijakan merupakan “*Whatever governments choose to do or not to do.*” atau yang dapat diartikan sebagai segala hal yang dikehendaki oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

4. Pal (1987) dalam Widodo (2021) mendefinisikan bahwa kebijakan diartikan “*as a course of action or inaction chosen by public authorities to address a given problem or interrelated set of problems.*” yaitu sebagai tindakan atau kelambanan yang diputuskan oleh otoritas publik untuk mengatasi masalah tertentu atau serangkaian masalah yang saling berkaitan.

Pengertian-pengertian berdasarkan pendapat para ahli tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa kebijakan adalah serangkaian keputusan atau kegiatan yang telah dipertimbangkan oleh pemerintah atau otoritas publik. Keputusan ini diambil untuk menyelesaikan masalah tertentu dan/atau untuk mencapai tujuan atau visi dan misi tertentu yang dikehendaki. Berdasarkan keputusan tersebut maka dibuatlah kebijakan. Kebijakan yang diimplementasikan dalam *institutional repository* akan berkembang dan disesuaikan dengan perkembangan institusi dan penggunaannya.

Ginting & Noor (2015) menyatakan bahwa kebijakan publik disusun dengan menggunakan metode ilmiah yang diharapkan dapat memecahkan permasalahan publik. Perumusan kebijakan umum ini terdiri dari beberapa proses, di antaranya:

1. Perumusan masalah, artinya pemerintah atau aktor pembuat kebijakan harus mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat secara luas. Identifikasi ini dilakukan untuk merumuskan permasalahan publik yang nantinya akan dipecahkan dengan adanya kebijakan;
2. Peramalan atau *forecasting*. Proses ini dilakukan dengan melakukan perkiraan terhadap dampak, manfaat, solvabilitas dan analisis tingkat kesulitan dalam implementasi kebijakan yang akan diterapkan;
3. Rekomendasi kebijakan dengan memberikan pilihan-pilihan atau alternatif kebijakan yang memberikan manfaat paling baik kepada pengambil keputusan kebijakan;
4. Pemantauan yang merupakan bagian dari proses implementasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau hasil dan dampak dari kebijakan yang telah diimplementasikan; dan

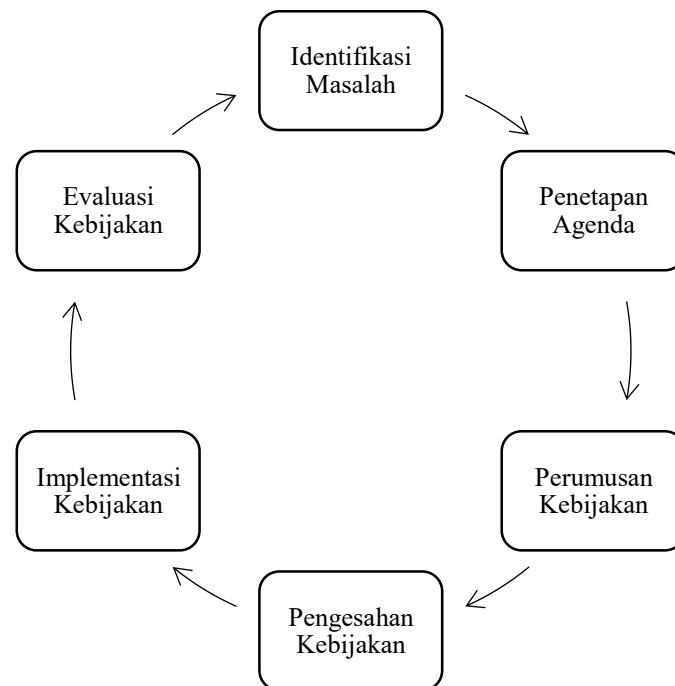
5. Evaluasi yaitu menilai kinerja kebijakan secara umum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Kebijakan muncul dari proses pembuatan kebijakan yang melibatkan berbagai aktivitas yang kompleks. Untuk membantu dalam perumusan kebijakan ini, para ahli mengembangkan kerangka untuk memahami proses pembentukan kebijakan. Kerangka ini disebut dengan siklus kebijakan atau *policy cycles*. Dye (1992) menjelaskan bahwa siklus kebijakan atau *policy cycles* dibagi menjadi 6 (enam) proses yaitu:

1. Identifikasi Masalah atau *Identification of Policy*.
Proses identifikasi masalah dalam hal ini dapat dilakukan melalui identifikasi hal yang menjadi tuntutan atau *demands* atas tindakan pemerintah.
2. Penetapan Agenda atau *Agenda Setting*.
Penyusunan agenda merupakan aktivitas untuk memfokuskan perhatian pada pemerintah atas keputusan yang akan diputuskan terkait dengan permasalahan tertentu.
3. Perumusan Kebijakan atau *Policy Formulation*.
Proses perumusan kebijakan merupakan proses pengusulan rancangan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan rancangan kebijakan melalui organisasi perencana kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, dan pihak terkait.
4. Pengesahan Kebijakan atau *Legitimizing of Policy*.
Proses ini merupakan pengesahan kebijakan yang telah dirumuskan melalui tindakan politik oleh pemerintah selaku pihak yang berkepentingan.
5. Implementasi Kebijakan atau *Policy Implementation*.
Implementasi kebijakan merupakan penerapan kebijakan yang telah disahkan melalui birokrasi, penetapan anggaran publik dan aktivitas pemerintah/*implementator* yang terorganisasi.
6. Evaluasi Kebijakan atau *Policy Evaluation*.

Proses penilaian atau evaluasi terhadap kebijakan yang diterapkan. Proses ini dilakukan oleh pihak pemerintah sendiri, konsultan di luar instansi pemerintah, pers dan masyarakat atau publik.

Secara detail siklus kebijakan atau *policy cycle* akan digambarkan dalam diagram berikut:



Gambar 2. 1 Diagram Siklus Kebijakan (Policy Cycle)

Penyusunan kebijakan merupakan fondasi dalam kebijakan publik. Ginting dan Noor (2015) menyebutkan bahwa sedikitnya ada tiga belas jenis teori yang ada dalam khazanah teori perumusan kebijakan. Teori tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Teori Kelembagaan yang didasarkan pada fungsi-fungsi kelembagaan dari pemerintah dalam setiap sektor dan tingkat. Proses dalam teori kelembagaan ini mengibaratkan bahwa tugas-tugas perumusan kebijakan merupakan tugas lembaga pemerintah yang dilakukan secara otonom tanpa berinteraksi dengan lingkungannya. Kelemahan dari penerapan model ini adalah terabaikannya masalah-masalah yang terdapat di lingkungan tempat kebijakan tersebut diterapkan.;

2. Teori Proses mengasumsikan bahwa politik merupakan suatu aktivitas sehingga memiliki proses. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka kebijakan publik merupakan suatu proses politik yang menyertakan rangkaian kegiatan dalam perumusan kebijakan.;
3. Teori Kelompok oleh Dye (1978) yang menyatakan bahwa kebijakan dipandang sebagai hasil keseimbangan kelompok. Teori kelompok ini mengibaratkan kebijakan sebagai *equilibrium* atau keseimbangan.
4. Teori Elite yang memandang bahwa kebijakan merupakan preferensi elite. Teori ini berasumsi bahwa sebesar apa pun nilai demokratis yang diterapkan selalu ada bias dalam perumusan kebijakan. Hal ini terjadi karena pada akhirnya kebijakan yang dibuat merupakan hasil dari perspektif elite politik.;
5. Teori Rasionalitas atau Rasional Komprehensif yang merupakan teori yang paling dikenal dan juga paling luas dalam aspek penerimaannya di kalangan pengkaji kebijakan. Menurut Muadi, *et.al.* (2016) teori rasionalitas ini mengedepankan ide bahwa kebijakan merupakan *maximum social gain* yang berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimum bagi masyarakat.;
6. Teori *Inkrementalis* atau teori penambahan oleh Charles E. Lindblom. Maksud dari teori ini adalah kebijakan merupakan variasi atau kelanjutan dari kebijakan yang telah diterapkan di masa lalu. Dengan kata lain bahwa melalui teori ini kebijakan dipandang sebagai sesuatu yang dapat ditambah dan dimodifikasi.;
7. Teori Penyelidikan Campuran atau *Mixed-scanning* oleh Amitai Etzioni (1967). Teori merupakan gabungan dari teori rasionalitas dan teori *ikrementalis*.;
8. Teori Demokratis yang menjabarkan bahwa tiap-tiap pemilik hak demokrasi harus diikutsertakan dalam perumusan kebijakan. Jika diimplementasikan, teori ini dinilai akan sangat efektif. Hal ini

dikarenakan setiap pihak yang berpartisipasi mempunyai kewajiban untuk mencapai keberhasilan kebijakan.;

9. Teori Strategis yang menggunakan runtutan perumusan strategi sebagai dasar perumusan kebijakan. Teori ini lebih difokuskan dalam dasardasar manajemen strategi.;
10. Teori Permainan yaitu teori yang paling abstrak dan deduktif dalam perumusan kebijakan. Teori permainan mengasumsikan kenyataan paling nyata bahwa setiap negara, pemerintah, dan masyarakat tidak hidup dalam keadaan vakum.;
11. Teori Pilihan Publik atau *public choice* oleh James M. Buchanan. Teori ini menyatakan bahwa masing-masing individu umumnya dituntun oleh keinginan atau ketertarikan pribadi. Termasuk juga di dalamnya politisi, pemerintah dan masyarakat. Teori ini memfokuskan diri pada pengambilan keputusan secara demokratis dalam dunia politik. Perumusan kebijakan menurut teori ini merupakan formulasi keputusan secara kolektif dari individu-individu yang berkepentingan atas keputusan tersebut.;
12. Teori Sistem oleh David Easton. Teori ini didasarkan pada konsep teori informasi yaitu *inputs, with inputs, outputs* dan *feedback*. Teori sistem memandang kebijakan sebagai respons atas suatu sistem politik. Melalui teori ini kebijakan dipandang sebagai suatu *outputs* atau keluaran dari sistem politik yang ada.; dan
13. Teori Deliberatif atau musyawarah. Teori ini menyatakan bahwa proses musyawarah ini berbeda dengan yang terjadi dalam teori demokratis. Karena peran dasar analisis kebijakan dalam teori ini hanya berperan sebagai fasilitator agar masyarakat menemukan sendiri keputusan yang dikehendakinya. Peran pemerintah hanya sebagai legislator dari kehendak publik.

Ginting & Noor (2015) juga menjabarkan dalam bukunya bahwa pada implementasi kebijakan ini, terdapat tingkat pengaruh sebagai implikasi dari tindakan pemerintah pembuat kebijakan, yaitu:

1. Adanya pertimbangan kebijakan atau keputusan yang dibuat, baik oleh aktor politik, pejabat pemerintahan atau aktor lainnya yang bertujuan untuk menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat.;
2. Adanya keluaran dari kebijakan tersebut di mana kebijakan yang diterapkan pada level tertentu ini menuntut pemerintah untuk melaksanakan peraturan, penyanggahan, pembentukan personil dan pembuatan regulasi dalam program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat.; dan
3. Adanya dampak dari kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Ketiga poin tersebut bersumber pada pernyataan oleh George Edward III yang menyatakan bahwa pendekatan kajian implementasi haruslah dimulai dengan pertanyaan abstrak, yaitu a) Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan? dan b) Apakah yang menjadi faktor penghambat utama untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut, dikonstruksikan empat kriteria yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, di antaranya adalah:

- a. *Communication* atau komunikasi sebagai sarana untuk menyebarluaskan informasi. Untuk menghindari distorsi informasi yang disampaikan dari atasan ke bawahan, perlu adanya waktu dalam penyampaian informasi, informasi yang disampaikan harus jelas, dan memerlukan ketelitian serta konsistensi dalam penyampaian informasi. Berdasarkan kriteria ini kemudian dikonstruksikan poin-poin untuk menyusun kisi-kisi wawancara yaitu: level implementasi, dan komunikasi.

- b. *Resources* atau sumber-sumber yang memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan. Hal ini karena implementasi kebijakan tidak akan efektif apabila sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Dijabarkan sumber-sumber pendukung implementasi kebijakan adalah sebagai berikut: 1) Staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian serta keterampilan untuk mengimplementasikan kebijakan, 2) Informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi, 3) Dukungan dari lingkungan untuk menyukseskan implementasi kebijakan, 4) Wewenang yang dimiliki implementor untuk mengimplementasikan kebijakan. Berdasarkan kriteria ini kemudian dikonstruksikan poin-poin untuk menyusun kisi-kisi wawancara yaitu: penyusunan program, peran aktor atau implementor kebijakan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan implementasi kebijakan.
- c. *Attitude* atau sikap yang berkaitan dengan sikap implementor dalam mendukung implementasi kebijakan. Biasanya implementor atau aktor politik bersedia mengambil inisiatif untuk mencapai tujuan kebijakan, namun hal ini juga bergantung pada sejauh mana wewenang yang dimiliki oleh implementor tersebut. Berdasarkan kriteria ini kemudian dikonstruksikan poin-poin untuk menyusun kisi-kisi wawancara yaitu: tujuan kebijakan, pandangan implementor terhadap kebijakan yang ada, dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan serta upaya penanggulangannya.
- d. *Bureaucratic structure* atau struktur birokrasi yang melibatkan lembaga atau organisasi untuk keperluan koordinasi yang efektif sehingga kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik. Berdasarkan kriteria ini kemudian dikonstruksikan poin-poin untuk menyusun kisi-kisi wawancara yaitu: pembentukan personil dan regulasi.

2.2.4. Open Access

Suber (2012) menyatakan dalam bukunya bahwa “*Open Access (OA) literature is digital, online, free of charge, and free of most copyright and licensing*”

restriction". Gerakan *open access* sendiri dipengaruhi oleh tiga kampanye, yaitu *The Budapest Open Access Initiative* pada bulan Februari tahun 2002, *The Bethesda Statement on Open Access Publishing* pada bulan Juni tahun 2003, dan *The Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities* pada bulan Oktober tahun 2003. Dikutip dari Pendit (2008) *The Budapest Open Access Initiative* mendeskripsikan *open access* dengan:

"By 'open access' to this literature, we mean its free availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software, or use them for any other lawful purpose, without financial, legal, or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself. The only constraint on reproduction and distribution, and the only role for copyright in this domain, should be to give authors control over the integrity of their work and the right to be properly acknowledged and cited."

Atas pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa gerakan *open access* ke literatur ini bermaksud untuk memberikan literatur yang gratis di internet secara publik. Keterbukaan akses juga berarti kebijakan untuk mengizinkan setiap pengguna untuk membaca, mengunduh, menyalin, menyebarkan, mencetak, mencari atau menautkannya pada versi teks lengkap literatur tersebut. selain itu *open access* juga mengizinkan untuk merayapi (*crawling*) untuk tujuan pengindeksan di mesin pencarian dan/atau kemudian meneruskannya sebagai data untuk perangkat lunak. Bahkan juga dapat digunakan untuk tujuan lain yang sah secara hukum, tanpa hambatan finansial, hukum atau teknis selain yang tidak bisa dipisahkan dari mendapat akses ke internet itu sendiri.

Satu-satunya hal dibatasi dari kebijakan *open access* ini adalah reproduksi dan distribusi, serta mengedepankan peran hak cipta. Kebijakan ini harus memberikan kendali pada penulis atas integritas karya mereka dan haknya untuk diakui dan dikutip dengan benar. Berdasarkan pernyataan tersebut, kebijakan *open access* ini justru memberikan mandat untuk memperhatikan hak cipta dan integritas dari penulis atau peneliti atas karya ilmiahnya. Pada implementasinya Handoyo & Istiarni (2020) menyatakan bahwa harus ada tindakan pencegahan untuk aksi plagiarisme oleh pengguna. Perguruan tinggi dapat membuat kesepakatan tertulis

dengan penulis atau kontributor karya ilmiah terkait dengan publikasi karyanya pada saat proses serah terima.

2.2.5. *Partial Access*

Partial access atau akses sebagian ini diartikan oleh Velmurugan & Ramasamy (2014) sebagai “*some articles from journal are available via open access*” atau dapat dikatakan bahwa terdapat sebagian bab pada karya ilmiah yang dipublikasikan dan sebagian lainnya tidak. Jika ditelisik pada kamus Bahasa Inggris, *partial* sendiri memiliki arti ‘*not complete*’ atau dalam Bahasa Indonesia berarti tidak utuh. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, parsial berarti berhubungan atau merupakan bagian dari keseluruhan.

Pendapat lain juga disampaikan oleh Handoyo & Istiarni (2020) bahwa kebijakan *partial access* ini memungkinkan keterbukaan akses pada bab-bab tertentu saja, namun pada bab lain diberlakukan pembatasan akses. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga karya cipta penulis pada bagian tertentu, terutama pada bagian yang berkaitan dengan hasil temuan penelitian.

2.2.6. *Closed Access*

Kebijakan *closed access* atau akses tertutup diartikan sebagai kebijakan yang memungkinkan *institutional repository* untuk menutup akses pada koleksinya. Handoyo & Istiarni (2020) menyatakan bahwa *closed access* adalah penutupan akses pada konten yang ada di dalam *institutional repository*. Kebijakan ini diberlakukan dengan tujuan untuk menjaga keamanan data yang ada dalam *repository*. *Closed access* ini dimaksudkan untuk melindungi data penelitian yang bersifat sensitif. Beberapa data tersebut berupa data perusahaan, data pasien, data pemerintahan dan lain sebagainya. Conte (2018) dalam web artikelnya menjelaskan bahwa kelebihan dari *closed access* adalah biaya penerbitan yang lebih murah dibandingkan dengan *open access*. Namun karya ilmiah yang disimpan pada *institutional repository* berbasis *closed access* ini lebih sedikit visibilitasnya dibandingkan dengan *open access*. *Closed access* ini hanya memungkinkan orang-

orang dari institusi tertentu atau orang yang mempunyai lisensi untuk melihat karya yang tersimpan dalam *institutional repository* tersebut.

2.3. Integrasi Islam dalam Implementasi Kebijakan

2.3.1. Implementasi Kebijakan dalam Islam

Islam merupakan suatu sistem kompleks yang mencakup seluruh laras kehidupan, mulai dari aspek agama dan ibadah, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, politik, kesehatan dan masih banyak lainnya. Sudarsa (2022) menyatakan dalam artikelnya bahwa kelengkapan ajaran Islam telah mendorong manusia bertumbuh menuju perkembangan dan kesadaran intelektual dan kultural. Pertumbuhan ini bersumber dari ajaran Al-Quran dan Hadist.

Nasar (2021) juga menjabarkan bahwa Al-Quran menginspirasi perkembangan ilmu pengetahuan dan mengajarkan peran serta tanggung jawab manusia yang diberikan amanah berupa ilmu. Al-Quran yang merupakan pedoman hidup atau *manhaj al-hayah* menuntun manusia agar memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sudarsa (2022) memaparkan bahwa pada hakikatnya Al-Quran merupakan sebuah kebijakan. Al-Quran merupakan sebuah kebijakan yang Allah SWT turunkan melalui Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran ini berisi pedoman atau *al-huda* yang memberikan petunjuk, tuntunan, panduan dan arahan bagi manusia untuk menuju jalan yang benar.

Lebih lanjut ia juga menjabarkan bahwa kebijakan dalam perspektif Islam merupakan kebijakan umum yang melahirkan kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat. Easton dalam Utomo (2021) menyatakan bahwa dalam proses pembuatan kebijakan terdapat perilaku politik untuk mengalokasikan nilai-nilai secara sah (*authoritative allocation of values*). Nilai-nilai yang dialokasikan dalam hal ini adalah tujuan untuk kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat.

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran dalam Surah Hūd ayat 6 bahwa:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۗ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Artinya: Tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauhulmahfuz).

Tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia (2023) menjabarkan bahwa tidak satu pun makhluk bergerak dan bernyawa, yang melata, merayap atau berjalan di muka bumi ini melainkan semuanya telah dijamin Allah rezekinya. Semua makhluk itu diberi naluri dan kemampuan untuk mencari rezeki sesuai dengan fitrah kejadiannya. Dia mengetahui tempat kediamannya ketika hidup di dunia dan mengetahui pula tempat penyimpanannya setelah mati. Semua itu sudah tertulis dan diatur serapi-rapinya dalam Kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz, perihal perencanaan dan pelaksanaan dari seluruh ciptaan Allah secara menyeluruh dan sempurna. Berdasarkan tafsir Surah Hūd ayat 6 dapat disimpulkan bahwa Allah SWT merencanakan dan melaksanakan kehidupan makhluknya dengan menyeluruh dan sempurna sehingga memberikan manfaat atau kemaslahatan bagi makhluknya. Melalui ayat ini dapat diambil pelajaran bahwa seorang pemimpin selaku pembuat dan *implementator* kebijakan hendaknya merumuskan kebijakan dengan tujuan untuk kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya.

Dalam Hadist dijabarkan bahwa hendaknya pemimpin bertindak sebagai pelindung bagi rakyatnya.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُفَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُنْفَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ وَإِنْ يَأْمُرُ بغيرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Ibrahim dari Muslim telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Syababah telah menceritakan kepadaku Warqa` dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seorang imam itu ibarat perisai, seseorang berperang di belakangnya (mendukung) dan berlandung (dari musuh) dengan (kekuasaan)nya. Jika seorang imam (pemimpin) memerintahkan supaya takwa kepada Allah 'azza wajalla dan berlaku adil, maka dia (imam) akan mendapatkan pahala karenanya, dan jika dia (imam) memerintahkan selain itu, maka ia akan mendapatkan siksa."* (HR. Muslim, Nomor Hadist: 3428 dalam Kitab Kepemimpinan).

Imam Al-Mawardi (1985) menyampaikan dalam kitabnya *Al Ahkam Ash Sulthaniyah* bahwa tugas utama seorang pemimpin dalam Islam adalah menjadi pelindung bagi rakyatnya. Pelindung dalam hal ini adalah agar rakyat yang dipimpinnya merasa aman baik pada diri mereka sendiri ataupun hartanya terutama

ketika melakukan perjalanan. Salah satu tugas penting pemimpin adalah memberikan jaminan keamanan bagi seluruh rakyatnya dalam segala aspek kehidupannya. Seorang pemimpin harus mampu memberikan perlindungan kepada rakyatnya serta dapat mengembalikan hak-haknya bila terjadi ketidakadilan.

Selain itu pemimpin harus menegakkan hukum dengan tegas agar segala yang dilarang Allah SWT tidak mudah dilanggar. Serta hendaknya memelihara hak-hak hamba Allah SWT agar tidak mudah diselewengkan dan diremehkan. Berdasarkan Hadist tersebut dapat pula disimpulkan bahwa kesejahteraan rakyat menjadi prioritas penting yang harus diperhatikan oleh pemimpin. Kebijakan yang dibuat oleh pemimpin harus memperhatikan hak-hak dan memberikan manfaat bagi rakyat.

2.3.2. Prinsip Implementasi Kebijakan dalam Islam

Sudarsa (2022) menjelaskan bahwa kebijakan publik dalam Islam adalah kebijakan umum yang ditujukan untuk kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut beberapa ilmuwan dan cendekiawan Muslim seperti Al-Ghazali dan Asy Syatibi menekankan pada terpenuhinya pilar *maqashid syariah*, *Maqashid syariah* ini sendiri diartikan sebagai upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Hadist. Dalam sumber lain dikatakan bahwa *maqashid syariah* merupakan penelusuran terhadap tujuan-tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum.

Sudarsa (2022) menyatakan bahwa terdapat enam prinsip utama dalam rangka penerapan kebijakan publik dalam perspektif Islam. Keenam prinsip tersebut adalah:

1. Ketuhanan atau *Ilahiyah*.

Prinsip ketuhanan mementingkan aspek bahwa dalam setiap proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik harus berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan.

2. Kemanusiaan atau *Insaniah*.

Prinsip ini menerangkan bahwa setiap kebijakan yang diimplementasikan pada dasarnya ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia, baik pada saat ini ataupun di masa yang akan datang.

3. Keseimbangan atau *Tawazun*.

Prinsip ini menerangkan bahwa setiap kebijakan yang dibuat harus memperhatikan semua elemen secara seimbang dan proporsional.

4. Keadilan atau *Al-'adalah*.

Prinsip keadilan mengatur bahwasanya setiap kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh pemerintah harus berlandaskan pada asas keadilan dan tepat sasaran. Prinsip keadilan ini disusun berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan serta keseimbangan.

5. Pelayanan atau *Al-Khadimah*.

Prinsip pelayanan ini berarti bahwa sesuai dengan keberadaan perumus kebijakan dalam hal ini adalah pemimpin sebagai pelayan masyarakat. Berdasarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, keseimbangan dan keadilan, maka kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan haruslah berorientasi pada pemberian pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

6. Keteladanan atau *Uswah al-Hasanah*.

Prinsip yang terakhir adalah keteladanan. Perumus kebijakan dalam hal ini pemerintah sebagai pelayan masyarakat juga merupakan pemimpin. Pemimpin ini hendaknya mengambil suri teladan seperti pada hakikat kepemimpinan yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Hakikat pemimpin digambarkan Rasulullah SAW dalam kalimat "*Sayyid al-qawm khaadimuhum*" yang berarti pemimpin suatu kaum atau rakyat adalah hamba atau pelayan bagi mereka.

2.3.3. Keistimewaan dan Tantangan Implementasi Kebijakan dalam Islam

Kebijakan tentu tidak dapat dipisahkan dari keilmuan politik dan hukum. Definisi kebijakan sendiri adalah apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Menurut Ichsan (2009) dapat dilihat bahwa Islam adalah kebijakan, peraturan atau hukum yang sesuai dan selaras bagi kehidupan manusia.

Hal ini tidak dapat terpisahkan dari adanya keistimewaan dari hukum Islam. Lebih lanjut ia menjabarkan bahwa keistimewaan itu di antaranya adalah:

- a. Hukum Islam berasal dari Allah SWT, oleh sebab itu hukum ini tidak terbatas pada suatu masa tertentu, tetapi dapat sesuai untuk diterapkan sepanjang zaman.
- b. Hukum dan asas Islam bersifat universal. Islam sendiri merupakan rahmat bagi seluruh alam, hidayah bagi seluruh manusia di muka bumi dan diturunkan untuk segenap umat manusia.
- c. Hukum atau asas Islam bersifat menyeluruh, yaitu melingkupi keseluruhan. Hukum Islam melingkupi semua hukum dan peraturan dari berbagai sudut, mulai dari pembentukan, pembinaan, serta perbaikan dari hukum tersebut. Selain itu juga hukum Islam mencangkup semua sendisendi kehidupan, mulai dari keyakinan, peribadatan, politik, kesehatan, ekonomi, pendidikan dan masih banyak lainnya.
- d. Hukum atau asas Islam didasari pada kemudahan dan tidak dibuat untuk membebani manusia.
- e. Hukum dan asas Islam juga sangat memperhatikan pemeliharaan kemaslahatan atau kesejahteraan manusia dan menjunjung tinggi peri kemanusiaan.
- f. Hukum Islam selalu memperhatikan keseimbangan antara materialisme dan spiritualisme.

Djanuardi (2020) dalam sebuah seminar juga menyebutkan bahwa beberapa keistimewaan yang ada adalah sebagai berikut:

- a. Nilai-nilai ajaran Islam banyak diadopsi dalam penerapan hukum karena dipandang sangat relevan dengan peraturan hukum yang ada.
- b. Ajaran agama Islam sangat komprehensif dan lengkap, sehingga dapat dijadikan pedoman dan tuntunan bagi semua aspek di kehidupan manusia.

Meski sudah terbukti dengan banyaknya keistimewaan dalam hal hukum dan kebijakan yang berlandaskan Islam, namun juga terdapat tantangan yang dihadapi pada proses implementasinya. Sholeh (2023) menjabarkan bahwa tantangan yang dihadapi dalam menerapkan hukum atau kebijakan berasaskan Islam adalah perubahan sosial, politik dan budaya dalam masyarakat modern. Adanya keragaman etnis, agama, budaya dan pandangan politik sering kali menjadi faktor yang menghalangi penerapan hukum atau kebijakan berasaskan Islam. Selain itu adanya perbedaan interpretasi dalam hukum Islam juga menjadikan tantangan tersendiri bagi *implementor* atau dalam hal ini pemerintah yang berwenang.

2.3.4. Hukum Implementasi Kebijakan dalam Islam

Jabaran panjang terkait dengan keistimewaan menerapkan hukum atau kebijakan yang berlandaskan Islam memberikan kesimpulan bahwa dalam menerapkan hukum atau kebijakan yang berlandaskan Islam terdapat banyak relevansi dan manfaat. Hukum juga diterapkan dalam rangka agar manusia dapat mengambil pelajaran dalam hidup. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT dalam Quran Surah An-Nur ayat pertama bahwa:

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *(Inilah) surah yang Kami turunkan, Kami wajibkan (menjalankan hukumhukum)-nya, dan Kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas agar kamu mengambil pelajaran.*

Tafsir ringkas Kementerian Agama (2023) menjelaskan bahwa surah ini dibuka dengan penegasan bahwa ketentuan hukum Allah wajib dilaksanakan. Inilah suatu surah yang Kami turunkan dan Kami wajibkan bagi kamu untuk menjalankan hukum-hukum di dalam-nya, dan Kami turunkan di dalamnya tanda-tanda yang jelas tentang kekuasaan dan keesaan Kami agar kamu selalu ingat dan mengambil pelajaran darinya.

Allah menjelaskan bahwa surah ini mengandung dua hal. Pertama, hukumhukum yang wajib dipatuhi seperti yang akan disampaikan dalam ayat-ayat berikutnya mengenai zina, menuduh perempuan berzina, dan sebagainya.

Hukumhukum itu, bila dipikirkan oleh manusia dengan pikiran yang obyektif, pasti akan diakui bahwa ketentuan-ketentuan itu benar dan berasal dari Allah bukan buatan manusia. Semua itu diturunkan untuk ditaati dan dijalankan dalam kehidupan. Kedua, bukti-bukti nyata yang menunjuk-kan kekuasaan dan keesaan Allah di dunia ini.

Sementara sikap yang harusnya dilakukan oleh masyarakat yang dipimpin adalah tunduk kepada hukum atau kebijakan yang diberlakukan. Namun perlu digarisbawahi bahwa hukum atau kebijakan yang diterapkan tidak melanggar apa yang sudah menjadi ketetapan dalam Islam. Hal ini seperti yang termaktub dalam firman Allah SWT dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).*

Tafsir ringkas Kementerian Agama (2023) menerangkan bahwa ayat ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu tentang berperilaku adil bagi seorang pemimpin. Agar penetapan hukum dengan adil tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka diperlukan ketaatan terhadap siapa penetap hukum itu. Ayat ini memerintahkan kaum muslim agar menaati putusan hukum, yang secara hierarkis dimulai dari penetapan hukum Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah perintah-perintah Allah dalam Al Qur'an, dan taatilah pula perintah-perintah Rasul Muhammad, dan juga ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh Ulil Amri pemegang kekuasaan di antara kamu selama ketetapan-ketetapan itu tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu masalah yang tidak dapat dipertemukan, maka kembalikanlah kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah, yakni Al-Qur'an, dan juga nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul dalam bentuk sunahnya, sebagai bukti jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu

lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya, baik untuk kehidupan dunia kamu, maupun untuk kehidupan akhirat kelak. Sedangkan tafsir *tahlili* dari sumber yang sama menerangkan bahwa ayat ini memerintahkan agar kaum Muslimin taat dan patuh kepada-Nya, kepada rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Untuk kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, hendaklah kaum Muslimin:

- a. Taat dan patuh kepada perintah Allah dengan mengamalkan isi Kitab suci Al-Qur'an, melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya, sekalipun dirasa berat, tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak pribadi. Sebenarnya segala yang diperintahkan Allah itu mengandung maslahat dan apa yang dilarang-Nya mengandung mudarat.
- b. Melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah saw pembawa amanat dari Allah untuk dilaksanakan oleh segenap hamba-Nya. Dia ditugaskan untuk menjelaskan kepada manusia isi Al-Qur'an.
- c. Patuh kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan ulil amri yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka. Apabila mereka telah sepakat dalam suatu hal, maka kaum Muslimin berkewajiban melaksanakannya dengan syarat bahwa keputusan mereka tidak bertentangan dengan Kitab Al-Qur'an dan hadis. Kalau tidak demikian halnya, maka kita tidak wajib melaksanakannya, bahkan wajib menentangnya, karena tidak dibenarkan seseorang itu taat dan patuh kepada sesuatu yang merupakan dosa dan maksiat pada Allah.
- d. Kalau ada sesuatu yang diperselisihkan dan tidak tercapai kata sepakat, maka wajib dikembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis. Kalau tidak terdapat di dalamnya haruslah disesuaikan dengan (dikiaskan kepada) hal-hal yang ada persamaan dan persesuaiannya di dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw.

Tentunya yang dapat melakukan kias seperti yang dimaksud di atas ialah orang-orang yang berilmu pengetahuan, mengetahui dan memahami isi Al-Qur'an dan sunah Rasul. Demikianlah hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

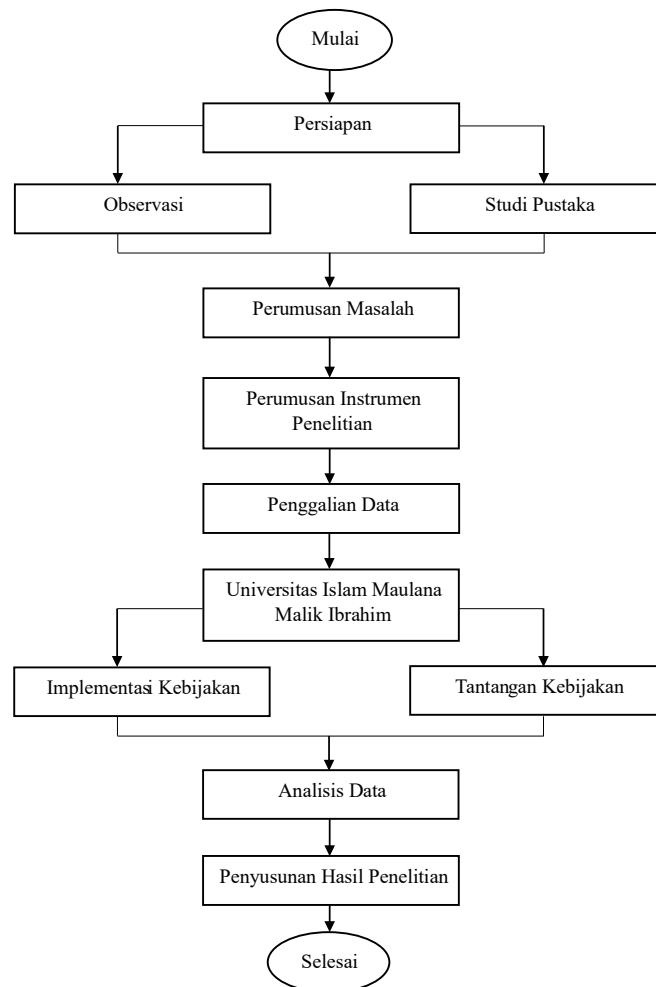
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berlandaskan pada paradigma *postpositivisme* atau paradigma interpretif dan konstruktif. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono (2022) yang menyatakan bahwa paradigma *postpositivisme* memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, menyeluruh, kompleks dan dinamis. Data yang terkumpul pada penelitian ini berbentuk katakata atau gambar dan lebih tidak berfokus pada angka. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Menurut Sugiyono (2022) objek pada penelitian kualitatif bersifat *naturalistic* atau alamiah. Objek alamiah ini adalah objek yang berkembang apa adanya dan tidak dimanipulasi oleh peneliti. Kehadiran peneliti pun tidak mempengaruhi dinamika objek penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara terpusat yang merupakan satu dari beberapa ragam penelitian. Penelitian dengan wawancara terpusat dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan yang sudah dirancang sehingga dapat mengetahui respons narasumber atas suatu isu. Berbeda dengan kuesioner yang pilihan jawabannya sudah tersedia, wawancara terpusat memberikan kebebasan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan maksudnya.

3.2. Alur Penelitian

Penelitian ini terdiri dari 6 (enam) tahapan yang dimulai dari proses persiapan berupa observasi dan studi literatur, perumusan masalah, perumusan instrumen penelitian, penggalan data, analisis data dan penyusunan kesimpulan dan rekomendasi pada hasil penelitian. Alur penelitian secara detail ditunjukkan pada gambar 3.1.



Gambar 3. 1 Alur Penelitian

Berikut adalah penjelasan dari alur penelitian:

3.2.1. Persiapan

Tahapan persiapan terdiri dari dua proses, yaitu observasi dan studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan acuan penelitian serupa yang berkaitan dengan topik penelitian.

3.2.2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dilakukan berdasarkan hasil observasi dan studi pustaka yang telah dilakukan. Berdasarkan rumusan masalah ini kemudian dilakukan perumusan batasan penelitian sebagai fokus penelitian.

3.2.3. Penyusunan Instrumen Penelitian

Pada tahap ini dilakukan penyusunan instrumen penelitian yang mengacu pada teori implementasi kebijakan oleh Ginting & Noor (2015). Teori implementasi

kebijakan ini kemudian dijabarkan menjadi 5 (lima) sub-variabel yang digunakan untuk penyusunan kisi-kisi wawancara.

3.2.4. Penggalan Data

Tahapan penggalan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik pencarian data berupa wawancara. Wawancara dilakukan pada subjek penelitian yaitu kepala perpustakaan dan pemustaka di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

3.2.5. Analisis Data

Pada tahapan ini akan dilakukan analisis data dari hasil yang telah didapat pada proses penggalan data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) tahapan yaitu reduksi dan kategorisasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data.

3.2.6. Penyusunan Hasil Penelitian

Tahapan terakhir yakni penyusunan hasil penelitian berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Hasil penelitian ini berupa kesimpulan penelitian dan saran.

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah lokasi di mana peneliti melakukan penelitian. Penentuan tempat penelitian ini dimaksudkan untuk menangkap fenomena penelitian yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data penelitian yang akurat. Lokasi yang menjadi tempat penelitian di antaranya adalah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang beralamat di Jln. Gajayana No. 50 Kota Malang. Situs yang diteliti adalah Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Pemilihan situs penelitian dilakukan dengan alasan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim memiliki karakteristik yang sesuai yaitu menerapkan kebijakan *Open Access* pada *institutional repository*nya. Sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan

institutional repository dan tantangannya di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3.3.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan pembagian dua bulan pertama untuk tahapan observasi, penyusunan proposal dan seminar proposal; dua bulan kedua dengan melaksanakan tahapan penelitian yang meliputi penggalian serta analisis data; serta dua bulan terakhir untuk tahapan laporan hasil penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Januari dan berakhir pada bulan Juli 2023.

3.4. Subjek dan Objek Penelitian

3.4.1. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* atau sampel bertujuan. Teknik *purposive sampling* ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap. Maka subjek dalam penelitian ini adalah *institutional repository* di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3.4.2. Objek Penelitian

Objek penelitian berfungsi sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu. Sugiyono (2022) menyebutkan bahwa objek penelitian pada penelitian kualitatif berupa situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat, pelaku dan aktivitas. Objek penelitian sendiri terdiri dari berbagai bentuk, baik manusia, benda, hewan, tumbuhan, fenomena, gejala ataupun nilai. Pada objek penelitian ini peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas dan orang-orang yang ada pada tempat tertentu. Oleh karena itu objek pada penelitian ini adalah implementasi kebijakan *institutional repository* pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

3.5. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat ditemukannya data dan informasi penting yang dapat digunakan untuk menunjang penelitian. Sumber data utama dalam penelitian

kualitatif berupa penjelasan atau deskripsi. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil langsung dari sumbernya oleh peneliti tanpa perantara. Data primer dimaksudkan untuk menjawab permasalahan atau tujuan penelitian. Data primer peneliti dapatkan dengan metode wawancara, observasi dan data yang bersumber dari informan. Sumber data primer pada penelitian ini adalah berupa hasil wawancara kepada kepala perpustakaan dan pemustaka yang merupakan mahasiswa.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil secara tidak langsung atau dari pihak lain yang diberikan untuk informasi dalam penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang didapatkan dari Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Serta data lainnya yang diperoleh dari internet, buku ataupun lainnya yang relevan dengan tujuan penelitian.

3.6. Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif menjadikan peneliti sebagai instrumen atau alat penelitian. Sugiyono (2022) dalam bukunya menyebutkan bahwa peneliti kualitatif yang bertindak sebagai *human instrument* berfungsi untuk menentukan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data penelitian, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas penemuannya.

Pendapat serupa juga dipaparkan oleh Nasution dalam Sugiyono (2022) bahwa tidak ada pilihan selain menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian yang utama. Hal ini didasari oleh alasan bahwa segala sesuatu belum mempunyai bentuk yang pasti. Baik masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas tersebut, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai satu-satunya alat yang dapat mencapai tujuan tersebut.

3.7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan paling strategis dalam penelitian. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat dan relevan. Rukin (2019) menyebutkan bahwa pada fase pengumpulan data dilakukan aktivitas berupa *research question*. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Salah satu alat untuk mengumpulkan data adalah dengan observasi. Observasi atau pengamatan dengan tujuan untuk memahami fenomena yang terjadi pada objek penelitian secara holistik atau menyeluruh. Melalui observasi di lapangan, Sugiyono (2022) menyatakan peneliti dapat mengumpulkan data yang melimpah. Terlebih lagi peneliti juga dapat memperoleh kesan-kesan pribadi dan ikut merasakan suasana fenomena sosial yang diteliti.

2. Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2022) mengartikan wawancara sebagai pertemuan dua orang untuk saling bertukar informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu. Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui dasar penyusunan dan dampak implementasi kebijakan *institutional repository* di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Informan yang diwawancarai pada penelitian ini terdiri dari kepala perpustakaan dan pemustaka yang merupakan mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada pelaksanaan wawancara, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang bertujuan untuk menjadi rujukan. Adapun kisi-kisi wawancara dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 1 Kisi-kisi Wawancara

Teori	Indikator	Pertanyaan
Teori Implementasi Kebijakan oleh Ginting & Noor (2015)	Adanya pertimbangan kebijakan.	Apakah yang menjadi dasar penyusunan kebijakan <i>institutional repository</i> ?
		Siapa yang menetapkan dasar penyusunan kebijakan <i>institutional repository</i> tersebut?

Teori	Indikator	Pertanyaan
		Apa tujuan yang ingin dicapai oleh perpustakaan dengan menerapkan kebijakan <i>institutional repository</i> tersebut?
		Bagaimana struktur organisasi yang bertugas dalam implementasi kebijakan <i>institutional repository</i> ini?
		Siapakah yang mengawasi pengimplementasian kebijakan <i>institutional repository</i> tersebut?
		Bagaimana peran kepala perpustakaan dalam penyusunan kebijakan <i>institutional repository</i> ?
		Bagaimana pandangan kepala perpustakaan terhadap implementasi kebijakan <i>institutional repository</i> tersebut?
	Adanya keluaran dari kebijakan.	Apakah <i>output</i> dari dasar penyusunan kebijakan <i>institutional repository</i> tersebut?
		Mengapa memilih menerapkan kebijakan <i>institutional repository</i> tersebut?
		Kapan kebijakan <i>institutional repository</i> tersebut diterapkan?
		Berapa lama kebijakan <i>institutional repository</i> tersebut diterapkan?
		Apakah terdapat penyusunan program tertentu sebagai tindak lanjut dari dasar penyusunan kebijakan <i>institutional repository</i> tersebut?
		Apakah terdapat struktur organisasi khusus dalam rangka implementasi kebijakan <i>institutional repository</i> tersebut?
		Apakah terdapat <i>Standard Operational Procedure</i> yang diterapkan untuk mendukung implementasi kebijakan <i>institutional repository</i> tersebut?
		Di level manakah <i>output</i> tersebut diberlakukan?

Teori	Indikator	Pertanyaan
		Apakah kebijakan <i>institutional repository</i> tersebut dikomunikasikan kepada pustakawan?
		Bagaimana respons dari pustakawan terkait kebijakan <i>institutional repository</i> tersebut?
		Apakah kebijakan <i>institutional repository</i> tersebut dikomunikasikan kepada pemustaka?
		Bagaimana respons dari pemustaka terkait kebijakan <i>institutional repository</i> tersebut?
		Apakah fasilitas perpustakaan memadai untuk implementasi kebijakan <i>institutional repository</i> tersebut?
	Adanya dampak dari kebijakan.	Bagaimana dampak positif dari penerapan kebijakan <i>institutional repository</i> tersebut?
		Bagaimana dampak negatif dari penerapan kebijakan <i>institutional repository</i> tersebut?
		Apa kesulitan yang dihadapi oleh perpustakaan dalam menerapkan kebijakan <i>institutional repository</i> tersebut?
		Apa tantangan yang dihadapi oleh perpustakaan dalam menerapkan kebijakan <i>institutional repository</i> tersebut?
		Bagaimana upaya perpustakaan dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam menerapkan kebijakan <i>institutional repository</i> tersebut?

3. Dokumentasi

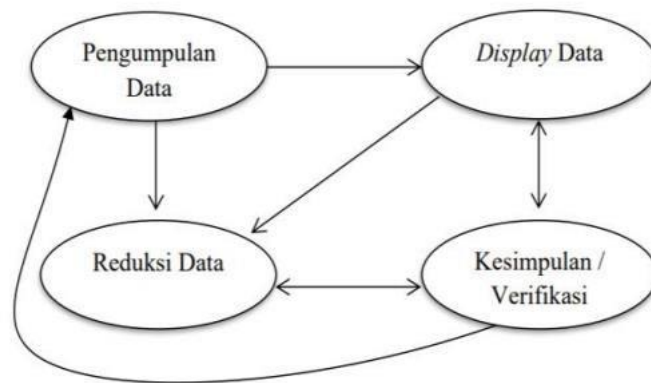
Dokumentasi merupakan proses untuk mencatat peristiwa yang sudah terjadi atau berlalu. Sugiyono (2022) menyebutkan bahwa bentuk dokumen ini sangat beragam, bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen berupa tulisan dapat berupa catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan dan kebijakan. Pada penelitian ini studi dokumentasi dibutuhkan untuk mendukung kredibilitas dalam penelitian juga menggambarkan kondisi asli di lapangan.

3.8. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif diartikan oleh Rukin (2019) sebagai upaya untuk mencari dan mengorganisasikan secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya. Tahapan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terkait fenomena yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan. Rijali (2018) dalam Rukin (2019) menjabarkan bahwa dalam penelitian kualitatif terdapat empat tahapan dalam analisis data secara berurutan. Tahapan ini merupakan model analisis data menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2022). Keempat tahap tersebut meliputi:

1. Pengumpulan data yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian. Pengumpulan data dapat menggunakan berbagai macam teknik, seperti observasi, wawancara mendalam dan pengkajian literatur.
2. Reduksi data dan kategorisasi data yang dilakukan dengan menyaring data mentah. Tahapan ini dilakukan dengan memilih data mana saja yang paling relevan untuk digunakan dalam penelitian. Hasil penyaringan data tersebut kemudian akan dikategorisasikan berdasarkan kebutuhan penelitian.
3. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *phi chard*, *pictogram* dan sejenisnya. Proses penyajian data ini memungkinkan data yang telah terproses menjadi terorganisasi dan tersusun dalam pola yang berhubungan sehingga dapat dengan mudah dipahami.
4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahapan terakhir dalam model analisis data menurut Miles dan Huberman. Kesimpulan awal yang ditemukan ini bersifat sementara dan akan berubah sesuai dengan penemuan bukti yang kuat dan mendukung. Tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti melakukan penelitian kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Temuan dalam penelitian kualitatif berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas. Jika penyajian data telah didukung dengan data yang valid, maka dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel.

Adanya proses analisis data diharapkan dapat membantu dalam mengungkap daftar data yang akan dicari, pertanyaan yang harus terjawab dan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi yang kemudian digunakan untuk membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami baik oleh peneliti maupun orang lain. Empat tahapan analisis data menurut model Miles dan Huberman (1984) dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. 2 Komponen Analisis Data Model Interaktif
(Sumber: Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Prof. Dr. Sugiyono)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim berdiri sejak tahun 1961 seiring dengan berdirinya Fakultas Tarbiyah Malang cabang dari IAIN Sunan Kalijaga. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim menempati gedung K.H. Abdurrahman Wahid dengan luas 8840 M² yang terdiri dari 4 (empat) lantai. 4 (empat) lantai tersebut merupakan lantai dasar yaitu area parkir, lantai 1 (satu) area sosial, lantai 2 (dua) yang merupakan area riset dan lantai 3 (tiga) yang merupakan area koleksi.

Seiring dengan perkembangan zaman, Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim terus melakukan perbaikan demi memberikan pelayanan prima bagi sivitas akademika serta untuk mendukung cita-cita universitas yang telah dituliskan dalam visi, misi dan tujuan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Perbaikan dan peningkatan ini dilakukan melalui perbaikan kualitas layanan dan koleksi, meliputi peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, layanan perpustakaan dan fasilitasnya.

Wujud berhasilnya peningkatan kualitas ini dibuktikan dengan penilaian oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan akreditasi A pada periode akreditasi tahun 2017 hingga 2020 dan tahun 2020 hingga 2025. Sejak tahun berdirinya, Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim telah menjalin jejaring melalui kerjasama antar perpustakaan dan tergabung pada asosiasi perpustakaan baik di tingkat nasional dan internasional.

Tahun 2021 Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim sudah tergabung menjadi anggota IFLA (*Internasional Federation of Library Associations and Institutions*) dan IATUL (*Internasional Association of University Libraries*). Selain itu situs web untuk publikasi secara daring yang salah satunya adalah *institutional* repository, menjadikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim menduduki peringkat 76 di Indonesia berdasarkan Webometrics.

4.1.2. Visi dan Misi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Peningkatan pelayanan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim mengacu pada visi dan misi sebagai berikut:

- a. Visi
Menjadi perpustakaan Perguruan Tinggi Islam yang berwibawa, memiliki keunggulan, kompetitif dan komparatif, berbasis teknologi informasi dan berstandar internasional untuk menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Misi
 1. Menjadi mitra profesional bagi masyarakat akademis dengan berperan sebagai penyedia dan penyebar informasi;
 2. Memberikan pelayanan prima dan inovatif dengan berorientasi pada kepuasan pengguna; dan
 3. Menjadi pusat akses informasi bagi masyarakat global pada bidang ilmu yang menjadi fokus universitas.

4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Visi dan misi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim ini juga diiringi dengan penetapan kedudukan, tugas dan fungsi perpustakaan. Aturan ini berlandaskan pada Peraturan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Nomor 3872 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja Pusat Perpustakaan. Berdasarkan pada peraturan rektor tersebut Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim berperan sebagai unsur penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan universitas.

Perpustakaan dipimpin oleh kepala perpustakaan yang bertanggung jawab pada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Sedangkan tugas perpustakaan adalah menyelenggarakan pelayanan, pembinaan dan pengembangan kepastakaan, mengadakan kerja sama antar perpustakaan, melakukan upaya pengendalian dan evaluasi, serta menyusun laporan kepastakaan.

Fungsi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim sebagaimana yang dijabarkan dalam peraturan rektor adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan dan perencanaan program strategis bagi perpustakaan;
2. Menyelenggarakan layanan dan pengelolaan layanan, pembinaan dan pengembangan perpustakaan serta kerja sama antar perpustakaan; dan
3. Mengendalikan, mengevaluasi dan menyusun laporan perpustakaan.

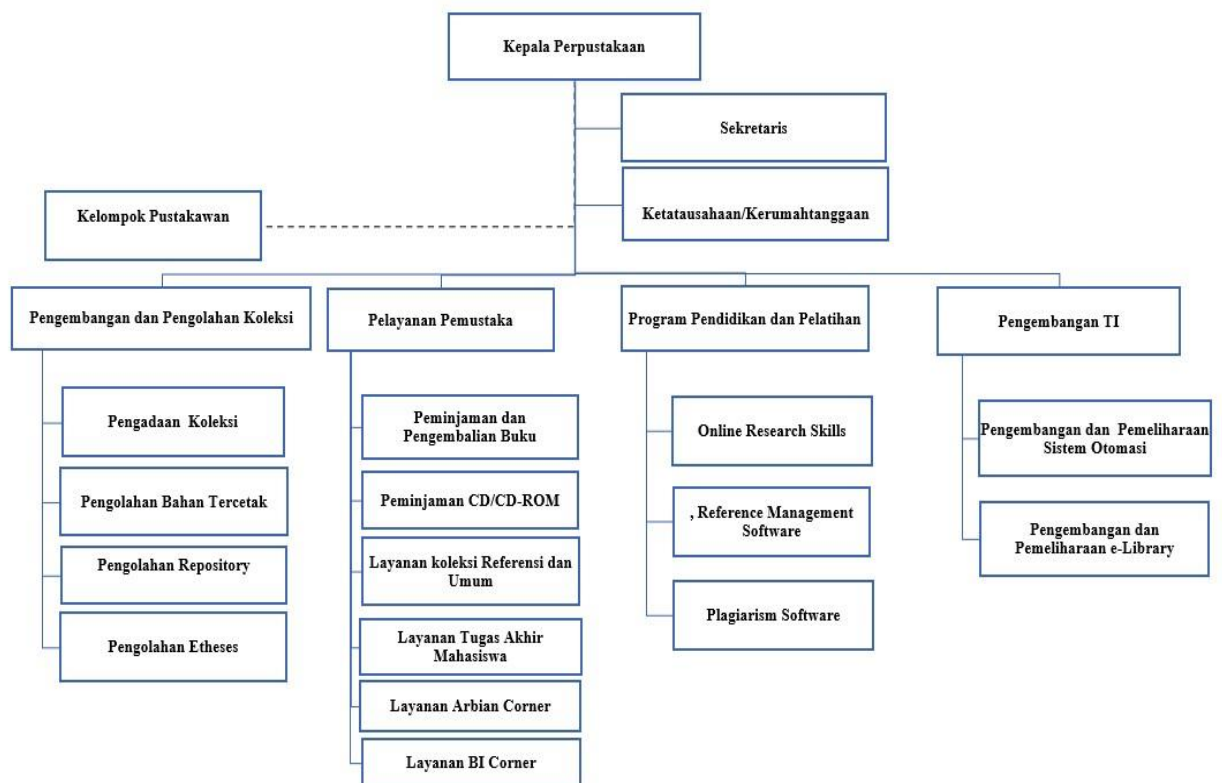
4.1.4. Struktur Organisasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Peraturan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim sebagai mana yang dijelaskan dalam sub bab sebelumnya juga mengatur tentang struktur organisasi perpustakaan. Dalam menjalankan tugasnya, Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim mengatur struktur organisasi yang bersifat dinamis yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan untuk menjamin profesionalisme. Keseluruhan staf perpustakaan berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang termasuk dengan *cleaning service* dan petugas keamanan. Struktur organisasi ini terdiri dari:

1. Kepala Perpustakaan;
2. Sekretaris;
3. Administrasi dan Ketatausahaan;
4. Koordinator Pengembangan dan Pengolahan Koleksi yang bertugas pada Pengadaan Koleksi, Pengolahan Bahan Tercetak, Pengolahan *Repository*, dan Pengolahan *E-Thesis*;
5. Koordinator Layanan Pemustaka yang bertugas untuk mengelola Peminjaman dan Pengembalian Buku, Peminjaman CD/CD-ROM, Layanan Koleksi Referensi dan Umum, Layanan Tugas Akhir Mahasiswa, dan Layanan *Corner*;
6. Koordinator Program Pendidikan dan Pelatihan yang bertugas mengelola *Online Research Skills*, *Reference Management Software* dan *Plagiarism Checker Software*;

7. Koordinator Pengembangan Teknologi Informasi yang bertugas Mengembangkan dan memelihara Sistem Otomasi Perpustakaan, serta mengembangkan dan memelihara sistem *e-Library*; dan
8. Kelompok Pustakawan.

Struktur organisasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dapat dilihat secara detail dalam bagan berikut:



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim.
(Sumber: Situs Web Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023)

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Implementasi Kebijakan *Institutional Repository* di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Hasil penelitian ini dibahas berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan oleh Ginting & Noor (2015). Informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berwenang dalam proses implementasi kebijakan *institutional repository* dan

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai pemustaka untuk mengetahui dampak dari implementasi kebijakan *institutional repository* tersebut.

Teori Implementasi Kebijakan Dasar Kebijakan ini memiliki beberapa komponen di antaranya adalah:

1. Dasar kebijakan

Hasil wawancara dengan Bapak Mufid, M. Hum. selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 pukul 09.00 WIB di ruang kepala perpustakaan, didapatkan bahwa *institutional repository* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim mengimplementasikan kebijakan *open access*. Penerapan kebijakan *open access* ini merupakan hasil dari inisiasi dan pertimbangan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim berdasarkan pada gelombang kesadaran secara global untuk mengampanyekan gerakan *open access* di tahun 2010. Sesuai dengan yang dijabarkan oleh narasumber, bahwa:

“Ya dari perpustakaan. Jadi dari perpustakaan menginisiasi itu untuk open access ya. Karena gelombang kesadaran untuk secara global ya istilahnya mengampanyekan open access itu di tahun 2010 itu sesungguhnya. Sehingga UIN Malang di tahun 2010 itu kita open-kan semua. Namun karena tidak kompatibel itu kemudian beralih ke Eprints.”
(M, wawancara, 10 Juli 2023)

Masa awal pembentukan *institutional repository*, Universitas Islam Negeri Malang tidak mempunyai payung hukum terkait kebijakan *open access*. Sehingga mulai tahun awal pengembangannya pada tahun 2010 hingga tahun 2014 *institutional repository* masih dikembangkan dalam platform lama yang dikembangkan sendiri oleh Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Kemudian pada tahun 2015 seiring dengan migrasi *institutional repository* menggunakan platform baru yaitu Eprints, disahkan pula payung hukum terkait hal ini.

“Nah di awal-awal itu kita tidak mengantongi yang namanya payung hukumnya kemudian tahun 2015 itulah repository itu memiliki payung hukum dari sisi keputusan Rektor. Jadi pada awalnya yang masih disimpan

di platform yang lama ya. Mulai tahun 2015 itu semua karya dosen dan mahasiswa itu itu wajib di simpan di repository.” (M, wawancara, 10 Juli 2023)

Kebijakan penerapan *open access* pada *institutional repository* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim ini semakin kuat dengan adanya payung hukum. Payung hukum ini berupa Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim No. Un.03/PP.00.9/690/2015 tentang publikasi karya ilmiah mahasiswa dan akses secara *fulltext*.

2. Tujuan Kebijakan

Tujuan penerapan kebijakan *open access* pada *institutional repository* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dipengaruhi oleh kesadaran akan fungsi perpustakaan itu sendiri yaitu penyebaran ilmu pengetahuan. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim mendukung penyebaran informasi secara terbuka kepada siapa pun yang membutuhkan. Penyebaran ilmu pengetahuan ini juga selaras dengan semangat dakwah Islam yaitu *tabligh*.

“Sesungguhnya perpustakaan itu fungsi utamanya menyebarkan ilmu pengetahuan, jadi itu juga selaras dengan semangat Islam. Kita sebagai salah satu unit yang memiliki fungsi itu maka kita harus memberikan akses seluas-luasnya kepada publik untuk bisa mengakses resources dalam hal ini repository yaitu secara open access.”

(M, wawancara, 10 Juli 2023)

Keterbukaan *institutional repository* ini juga mengikuti perkembangan teknologi sehingga tetap bisa relevan pada masa kini. Semua koleksi yang ada di *institutional repository* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dapat diakses secara penuh kecuali jika ada permintaan khusus terkait data-data yang mengandung privasi suatu organisasi atau instansi. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan narasumber dalam wawancara, bahwa:

“Selagi itu tidak ada data yang privasi, ya itu kita buka semua, karena semangatnya adalah, semangat tabligh. Menyebarkan keilmuan, ilmu pengetahuan secara luas. Itu tujuan perpustakaan menampung, mengarsip koleksi. Jika kemudian koleksinya dibatasi itu percuma begitu

kan itu menyalahi semangat didirikannya perpustakaan.” (M, wawancara pada 10 Juli 2023)

3. Peran Aktor/*Impelentator* Kebijakan

Kebijakan *open access* pada *institutional repository* di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim ini merupakan prakarsa dari banyak pihak. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim menginisiasi kebijakan *open access* ini pada masa kepemimpinan kepala perpustakaan Bapak Imron Rosyidi dengan berbagai masukan dari pustakawan.

“Yang menginisiasi untuk memberikan open access itu pada saat itu pimpinan perpustakaan itu Pak Imron Rosyidi ya. Dengan berbagai masukan dari pustakawan gitu ya. Itu dan dari menanggapi dari apa namanya, perkembangan di dunia terkait dengan open access itu Maka kemudian kita membuat repository secara mandiri begitu”
(M, wawancara, 10 Juli 2023)

Pada masa awalnya platform yang digunakan merupakan hasil pengembangan dari tim IT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim sendiri. Namun mempertimbangkan kompatibilitas dengan alat indeks *repository*, maka platform yang digunakan berganti menjadi Eprints. *Institutional repository* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim ini berada di bagian pengembangan koleksi dalam struktur organisasi perpustakaan. Di dalamnya terdapat petugas-petugas yang menjadi penanggung jawab *institutional repository*.

“Jadi ada repository itu bagian dari pengembangan koleksi ya. Bagian dari pengembangan koleksi Nah itu ada petugas-petugas yang menjadi penanggung jawab di repository. Untuk mahasiswa dan dosen itu ya. Yang melaksanakan atau yang mengarsipkan itu Itu ya dosen dan mahasiswa secara mandiri Jadi perpustakaan hanya sebagai verifikasi. Jadi untuk melihat memverifikasi data, kebenaran metadatanya, ya visibilitasnya. Kemudian baru diaktifkan jadi bukan perpustakaan.” (M, wawancara, 10 Juli 2023)

Berdasarkan pernyataan tersebut didapati bahwa peran pustakawan hanya sebagai verifikasi dalam *institutional repository* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Tugas untuk mengarsipkan karya tulis dilakukan oleh pemustaka sendiri dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Meski begitu,

Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim tetap bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga atas layanan yang ada. Hal ini sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 3872 tentang Pedoman Kerja Pusat Perpustakaan.

4. Keluaran dari Kebijakan

Institutional repository Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu *e-Resource* UIN Malang dan *e-Theses*. *e-Resource* UIN Malang dikhususkan untuk karya tulis ilmiah dosen dan staf, dan *e-Theses* dikhususkan untuk karya tulis ilmiah mahasiswa yang berupa tugas akhir (skripsi, tesis dan disertasi). *Repository* dosen dan staf dapat diakses dengan <http://repository.uinmalang.ac.id/>, dan *repository* mahasiswa dapat diakses dengan alamat <http://etheses.uin-malang.ac.id/>. Saat ini Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim menerapkan sistem unggah mandiri karya tulis pada *institutional repository*nya.

“Jadi ada 2 tempat repository itu. Repository untuk karya dosen, namanya repository alamatnya itu di e-resource UIN Malang itu. Kemudian untuk tugas akhir mahasiswa namanya ethesis di UIN Malang.”(M, Wawancara, 10 Juli 2023)

Sistem ini mulai diterapkan sejak tahun 2020 hingga saat ini. Sebelum tahun 2020, karya tulis dosen maupun mahasiswa ini disetorkan ke perpustakaan kemudian akan diunggah oleh petugas yang bertanggung jawab. Namun berdasarkan hasil evaluasi oleh perpustakaan, diterapkan sistem baru yaitu sistem unggah mandiri.

“Kemudian kita sejak tahun 2020 Jadi tahun 2010 sampai tahun 2019 itu unggah mandiri Tahun 2020, unggah mandiri, diunggah oleh petugas. Jadi petugas perpustakaan atau perpustakaan itu yang mengunggah. Sekarang mulai tahun 2020 sampai sekarang itu karena kita melakukan hasil evaluasi Itu maka kita berubah sistem pengunggahannya, yaitu secara mandiri. Jadi nanti kan, kamu itu kalau mau selesai kan wajib mengunggah skripsi itu secara mandiri. Termasuk dosen dan seterusnya itu ya diunggah secara mandiri.”(M, Wawancara, 10 Juli 2023)

Cara kerja sistem ini adalah dosen atau mahasiswa melakukan unggah mandiri pada sistem *institutional repository* dengan mengikuti prosedur yang ada, kemudian petugas perpustakaan akan melakukan verifikasi data, *metadata* dan visibilitasnya, setelah itu baru akan diaktifkan sehingga dapat diakses oleh pemustaka.

“Yang melaksanakan atau yang mengarsipkan itu itu ya dosen dan mahasiswa secara mandiri. Jadi perpustakaan hanya sebagai verifikasi. Jadi untuk melihat memverifikasi data, kebenaran metadatanya, ya visibilitasnya. Kemudian baru diaktifkan jadi bukan perpustakaan. Dulu sempat perpustakaan yang mengunggah ya. Tapi kemudian itu kurang efektif.”(M, wawancara, 10 Juli 2023)

Lebih jelasnya terkait jenis *institutional repository* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 1 Jenis Institutional Repository UIN Maulana Malik Ibrahim

Jenis <i>Institutional Repository</i>	Pengguna	Alamat Web
Research Repository UIN Malang	Dosen	http://repository.uinmalang.ac.id/
e-Theses UIN Malang	Mahasiswa	http://etheses.uinmalang.ac.id/

(Sumber: Data wawancara diolah.)

5. Penyusunan Program, pembentukan personil dan regulasi.

Sistem unggah mandiri pada *institutional repository* di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim ini dilengkapi dengan *Standard Operational Procedure* atau SOP yang jelas. SOP ini dapat diakses oleh pemustaka melalui situs web Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Penjelasan khusus terkait SOP ataupun panduan untuk sistem unggah mandiri ini kemudian akan dijelaskan saat pelatihan unggah mandiri yang diadakan rutin oleh perpustakaan.

Saat ini Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim juga sedang menyiapkan panduan dalam format video sehingga diharapkan sistem unggah mandiri ini dapat lebih dimengerti oleh pemustaka. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan narasumber, bahwa:

“Ketika nanti mau mengunggah itu sudah ada, dan juga di website perpustakaan juga kita sediakan informasi ya, secara umum kemudian secara khusus nanti di pelatihan-pelatihan itu. Kita juga sedang menyiapkan untuk versi tutorialnya secara dalam format video ya. ? Panduannya step by step. Jadi nanti di klik tanda tanya, maka akan muncul prosedur bagaimana penggunaan setiap ruas yang harus diisi itu harus seperti apa, ada panduannya.”(M, Wawancara, 10 Juli 2023)

6. Fasilitas Perpustakaan untuk Mendukung Implementasi Kebijakan

Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim menyediakan dua platform *institutional repository*. Satu khusus untuk mengunggah karya tulis ilmiah berupa tugas akhir mahasiswa. Sedangkan satu yang lain digunakan untuk mengunggah karya ilmiah dosen. Kedua *institutional repository* ini dikembangkan dengan menggunakan perangkat lunak Eprints versi 3.

“Terkait dengan open access itu, maka kemudian kita membuat repository secara mandiri begitu. Maksudnya membuat, membangun sendiri gitu ya. Namun dalam perjalanannya platform yang dibuat itu tidak kompatibel dengan Google Scholar, dengan index ya. Dengan index-index yang lain Sehingga kemudian kita menggunakan platform yang sudah banyak digunakan di perguruan tinggi Di dunia ya, ada dua namanya DSpace sama Eprints, kita milih, milih mana ini? Kenapa? Karena kemudian kita pilih Eprints.”(M, Wawancara, 10 Juli 2023)

Pemilihan perangkat lunak Eprints ini dilakukan pada tahun 2015 atas berbagai pertimbangan. Awal adanya *institutional repository* di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim platform yang digunakan masih berupa platform buatan sendiri. Namun karena kendala platform yang tidak sesuai atau tidak *compatible* dengan Google Scholar, maka diputuskan untuk beralih menggunakan platform Eprints.

“Struktur meta, struktur sistem informasinya ya. Saya kira itu lebih mudah dipahami ya. Lebih mudah dipahami, lebih mudah untuk memahami struktur atau taksonomi keilmuannya juga begitu.”(M, Wawancara, 10 Juli 2023)

Pemilihan platform Eprints ini dilakukan berdasarkan pertimbangan akan kemudahan. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim menggunakan Eprints karena struktur metadata dan taksonominya yang mudah

dipahami. Selain itu Eprints dipilih karena penggunaannya yang banyak di Indonesia dan mudah dikustomisasi oleh petugas perpustakaan.

“Kemudian ini, metadatanya. Fitur-fiturnya maksud saya ya. Fitur-fiturnya itu lebih sesuai dengan pemahaman teman-teman di sini begitu. Di samping itu juga sudah banyak digunakan di Eropa. Jadi kalau Eprints itu lebih banyak di Eropa, DSpace itu lebih banyak di Amerika. Jadi semuanya itu dua kubu ya, waktu itu ya. Kita pilih yang Eropa dan juga melihat kustomisasi dan seterusnya itu lebih mudah di Eprint begitu. Itu sebagian pengetahuan saya ya. Jadi kemudian itu ya kita lakukan evaluasi. Dan hasil evaluasi itu kemudian kita tetapkan untuk penggunaan Eprint sebagai platform untuk repositorynya UIN Malang, dan itu kemudian di Indonesia paling banyak. Karena mungkin lebih sesuai dengan pemahaman teman-teman yang ada di Indonesia begitu. Daripada DSpace ya.” (M, Wawancara, 10 Juli 2023)

7. Komunikasi sebagai Langkah Sosialisasi Kebijakan

Implementasi kebijakan *open access* pada *institutional repository* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim sudah dilakukan selama 14 (empat belas) tahun. Selama 14 tahun tersebut perpustakaan Universitas Maulana Malik Ibrahim terus melakukan upaya sosialisasi dan promosi sebagai tindak lanjut dari penyusunan kebijakan *open access* pada *institutional repository*nya. Upaya sosialisasi dan promosi ini berupa kegiatan pelatihan literasi informasi pada pemustaka. Ada juga lomba penelusuran artikel ilmiah pada *institutional repository* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Kegiatan literasi informasi yang dilakukan oleh perpustakaan ini juga antusias diikuti oleh mahasiswa sebagai pemustaka.

“Kita bikin pelatihan-pelatihan ya. Kalau ke dosen kita bikin pelatihan ke dosen, memperkenalkan, mempromosikan, semuanya itu kita promosi kan. Kemudian ketika sudah jalan, waktu sudah berubah manajemennya dari unggah oleh petugas kemudian ke arah unggah mandiri, kita sediakan pelatihan juga. Artinya itu salah satu upaya kita untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa bagaimana mengunggah, menggunakan platform (repository) itu.”(M, Wawancara, 10 Juli 2023)



Gambar 4. 3: Poster Literasi Informasi Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim
(Sumber: Akun Instagram @uinmaliki_library, 2023)

Upaya promosi dan sosialisasi ini bukan hanya dilakukan kepada mahasiswa lama ataupun dosen saja, namun juga diperkenalkan kepada mahasiswa baru sebagai langkah memperkenalkan fungsi dan pemanfaatan sumber daya informasi yang ada di perpustakaan. Sosialisasi pada pemustaka ini juga dimaksudkan agar mahasiswa dan dosen dapat mengetahui tren riset yang ada pada masing-masing program studi dan tren riset di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim secara luas. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim juga menyampaikan pandangannya pada bahwa adanya masing-masing potensi dari *institutional repository* milik universitas-universitas yang ada di Indonesia.

“Saya melihat kemampuan distingsi dari masing-masing universitas di Indonesia. Ada banyak program studi, Tarbiah yang di sini yang paling lama misalnya dengan Tarbiah yang paling lama di Surabaya. Itu misalnya kekuatannya di mana? Bahasa Arab di Malang itu kan seluruh Indonesia kan paling bagus, bahasa Arab. Nah itu kekuatannya di mana? Itu dengan melihat basis itu bisa atau tidak sampai ke sana.”(M, Wawancara, 10 Juli 2023)

Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim menyampaikan bahwa meski belum melakukan evaluasi kebijakan *open access* kepada pemustaka, namun kebijakan ini dirasa tidak memberatkan. Mahasiswa juga antusias untuk datang berkunjung ke perpustakaan untuk menggunakan

layanan sumber informasi berupa tugas akhir secara digital di *institutional repository*.

“*Respons untuk kebijakan open access ya, ya secara kita belum, belum apa namanya, melakukan secara khusus ya. Tetapi karena itu menjadi kewajiban, ya sampai hari ini tidak ada yang merasa keberatan atau apa gitu ya, karena itu menjadi sebuah kewajiban yang harus diunggah begitu. Kalau masalah respons terkait dengan pentingnya itu, itu secara umum itu ya cukup tinggi ketika kita melakukan apa namanya, promosi melalui literasi informasi.*” (M, wawancara, 10 Juli 2023)

Upaya sosialisasi manfaat *institutional repository* salah satunya disampaikan melalui layanan literasi informasi yang rutin dilaksanakan oleh Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Narasumber juga menyampaikan bahwa adanya antusiasme untuk mengakses koleksi berformat digital di *e-Theses*.

“*Jadi setelah literasi informasi kita salah satunya adalah menyampaikan manfaat etesis itu kayak apa. Sehingga mereka sangat apa namanya, antusias untuk datang, berkunjung, melihat karya-karya dari teman-teman angkataannya, kakak tingkat, misalnya jurusan perpustakaan nanti berapa nih sudah, ya mengunggah, jadi kan tidak perlu lagi harus datang ke perpustakaan, cari tercetaknya gitu ya, cukup melihat di etesis sudah bisa. Dan akses tercetak itu karena sudah tidak ada versi tercetak, ya masih tetap tapi sangat rendah. Yang berada di lantai 2 itu mereka mengakses ya etesis gitu, mereka mengerjakan skripsi juga dengan mengakses etesis itu. Secara khusus belum, tapi secara ini mereka sangat antusias ya.*” (M, Wawancara, 10 Juli 2023)

8. Dampak Positif dari Implementasi Kebijakan

Meskipun belum pernah mengadakan evaluasi dan survei secara formal, kebijakan *open access* ini dirasa banyak memberikan dampak positif menurut Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Kebijakan ini memungkinkan pemustaka untuk mengakses secara penuh sumber daya informasi dalam hal ini koleksi dalam *institutional repository*.

Selain itu juga saat ini keterbukaan informasi sudah didukung dengan teknologi yang memadai. Sehingga informasi yang sebelumnya hanya bisa diakses secara konvensional atau harus datang ke perpustakaan, saat ini sudah dapat diakses secara daring dari mana pun dan kapan pun. Beberapa dampak

positif yang bisa dirasakan oleh pemustaka di antaranya adalah mempercepat perkembangan kajian keilmuan tertentu. Dengan adanya sumber informasi yang mudah diakses dapat mempercepat perkembangan kajian keilmuan tertentu.

“Yang pertama yang jelas mempercepat perkembangan kajian keilmuan tertentu ya. Jadi mempercepat munculnya temuan-temuan baru. Jadi penyebaran keilmuan semakin cepat, otomatis temuan-temuan semakin cepat.”(M, wawancara, 10 Juli 2023)

Kebijakan *open access* ini juga dapat mempercepat produksi keilmuan dalam bidang tertentu. Selain itu juga dapat mengurangi penelitian yang repetitif atau berulang-ulang. Dengan adanya akses terbuka pada sumber informasi, calon peneliti dapat melihat tren penelitian sehingga mengurangi penelitian yang repetitif.

“Juga mempercepat produksi keilmuan, memproduksi keilmuan baru di bidang masing-masing tentunya. Kemudian mengurangi keberulangan riset, jadi misalnya karena sudah terarsip di situ open access semuanya, adik-adik tingkat tidak mungkin akan melakukan penelitian yang sama. Jadi mengurangi keberulangan riset sehingga memunculkan riset-riset baru dan mempercepat produksi temuantemuan dalam bidang tertentu.” (M, Wawancara, 10 Juli 2023)

Dampak positif lainnya adalah adanya percepatan publikasi. Adanya percepatan publikasi ini merupakan hasil dari integrasi teknologi dengan semangat penyebaran ilmu dalam *open access*. Prinsip *open access* yang mendukung akan diseminasi informasi secara luas juga bermanfaat bagi peneliti untuk mendapat sumber informasi. Sumber informasi tersebut dapat digunakan untuk melihat tren penelitian. Aksesnya juga dimudahkan dengan ketersediaannya secara daring melalui perangkat elektronik.

“Publikasi ya, mempercepat publikasi. Sekarang itu publikasi, kalau dulu orang membuat karya itu cukup lama. Kalau menunjukkan skripsi bisa satu tahun baru skripsi ya, mungkin 6 bulan itu baru mendapatkan buku-bukunya. Tapi sekarang serba online mudah semua bisa open access, tidak ada yang ditutup-tutupi. Misalnya kalau mau fokus satu bulan setengah sudah selesai saya yakin. Jadi karena kemudahan itu yang dulunya harus mencari skripsi, di sana judulnya apa saja sekarang kan tinggal cukup di depan laptop bisa mencari di browser, segala macam. Jadi informasinya,

bisa memudahkan untuk melihat tren, tren dari perkembangan keilmuan tertentu. Mengurangi keberulangan riset, dan mempercepat publikasi.” (M, Wawancara, 10 Juli 2023)

Implementasi kebijakan *open access* pada *institutional repository* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim tentu saja menimbulkan dampak bagi pemustaka. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada beberapa pemustaka didapatkan hasil bahwa dengan adanya kebijakan *open access* pada *institutional repository* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim mahasiswa merasa terbantu dalam mencari sumber informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan akademik. Seperti pernyataan oleh mahasiswa angkatan 2019 pada wawancara bahwa:

“Dampak baiknya banyak banget, karena sebelum kita bikin judul skripsi kita bisa ngerti pandangannya mau ngambil tema apa skripsinya. Kalau di prodiku (Pendidikan Islam Anak Usia Dini) disebutnya tema ya. Terus dari bab tiganya juga full ya jadi lebih memudahkan. Kalo dari buku kan kurang detail ya, gak selengkap dari skripsi. Terus kan nyambung juga sama bab empat dan lima jadi bisa dimanfaatkan dengan baik.” (QS, Wawancara, 28 September 2023)

Narasumber lain juga menyatakan bahwa dengan adanya kebijakan *open access* ini membantu dalam mencari referensi dari karya tulis terdahulu yang sudah ada. Lebih lanjut narasumber menyatakan bahwa mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim merasa terbantu karena tidak perlu membuat akun untuk mengakses sumber informasi yang ada pada *institutional repository*. Selain itu juga tidak kerepotan dengan meminta tolong kepada mahasiswa perguruan tinggi lain atau bahkan admin perpustakaan dalam mengakses sumber informasi. Hal ini disebabkan karena sudah tersedianya koleksi milik universitasnya sendiri yang bisa dimanfaatkan.

“Sebagai mahasiswa apalagi yang sedang skripsi-an itu ya sangat membantu sih, soalnya ya pasti kayak (butuh) banyak referensi skripsi-skripsi orang-orang terdahulu juga. Pokoknya membantu banget lah, gak perlu buat akun lah, atau minta tolong mahasiswa kampus lain lah atau minta akses ke adminnya dan segala macem. Bisa langsung di download gratis begitu, gak ribet.” (AD, Wawancara, 28 September 2023)

9. Dampak Negatif dari Implementasi Kebijakan

Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim mengatakan bahwa sebaliknya tidak ada dampak negatif dari penerapan kebijakan *open access* pada *institutional repository* ini. Menurutnya penyebaran ilmu pengetahuan hanya akan menimbulkan dampak positif jika disikapi dengan baik. Sedangkan sisi negatif ini akan muncul dari individu yang tidak memahami hakikat *open access*. Sehingga diharapkan individu atau dalam hal ini adalah pemustaka yang menggunakan *institutional repository* harus memiliki pemahaman yang matang terhadap etika riset.

“Orang menyebarkan ilmu itu masa ada dampaknya? Jelek gitu kan Dampak positifnya 100% untuk kemakmuran, kemaslahatan umat manusia. Karena tulang punggung orang menjadi sejahtera itu ya ilmu. Kalau dia keilmuannya semakin tinggi maka itu sejajar dengan kesejahteraan. Nah kalau misalnya sekarang sisi negatif, sisi negatif itu ada itu dari sisi individu yang tidak memahami apa itu open access. Mahasiswanya itu harus matang pemahaman terhadap riset, contoh begitu mahasiswa mau meneliti maka harus paham etika riset. Batasan-batasan etis, tidak etis, etika riset itu apa.” (M, Wawancara, 10 Juli 2023)

Terkait dengan pembahasan dampak negatif ini, kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim juga menekankan bahwa harus ada perbedaan terkait penerapan kebijakan *institutional repository* dengan ketakutan akan munculnya fenomena plagiasi karya ilmiah. Plagiarisme dan kebijakan *open access* itu dinilai tidak berhubungan, karena kebijakan *open access* ini adalah semangat untuk menyebarkan ilmu, sedangkan plagiasi itu merupakan perbuatan yang melanggar etika riset.

“Kalau masalah e-thesis 100% tidak ada negatifnya. Nah hanya ada itu tadi, pemahamannya harus matang. Mahasiswanya itu harus matang pemahaman terhadap riset. Contoh gitu mahasiswa mau meneliti maka harus paham etika riset, batasan-batasan etis, tidak etis, etika riset itu apa. Contoh misalnya data ini apakah saya buka? Apakah saya jelaskan secara detail di skripsi? Atau kemudian saya berikan nama samaran atau lain begitu. Itu etika riset yang mengaturnya ya. Kita harus mengikuti etika riset itu. Tetapi thesis sendiri itu tidak ada dampak negatifnya.” (M, Wawancara, 10 Juli 2023)

Narasumber berharap pemustaka tidak perlu merasa ketakutan akan plagiarisme karena plagiarisme sendiri sudah diatur pula dalam kebijakan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Plagiarisme sendiri dikategorikan sebagai pelanggaran berat sehingga dapat berakibat buruk bagi peneliti. Bahkan plagiarisme dapat menimbulkan pencopotan gelar akademik.

“Nah kalau kemudian ini ada plagiarisme, ini sesuatu yang melanggar etika riset. Ya sudah sesuatu yang berbeda. Jadi jangan dimasukkan. Oh jangan di-openkan karena nanti banyak yang plagiarisme. Ya sudah tidak usah meneliti. Maksudnya jangan dicampur-adukan dan jangan dijadikan sebagai dasar bahwa plagiarisme ketakutan open access karena plagiarisme. Nah plagiarisme itu perilaku individu. Jadi perilaku terhadap pelanggaran etika riset yang itu merupakan dosa besar. Nah itu kategori dosa besar di dunia akademik begitu. Dalam konteks ini dosa besarnya ya, pokoknya pelanggaran berat begitu. Nah itu sudah diatur oleh peraturan Kemendikbud. Misalnya itu lihat berkait dengan plagiarisme, jadi ada plagiarisme pelanggaran berat maka gelarnya dicopot dan seterusnya. Nah itu tidak ada hubungannya dengan open access ini. Tidak ada hubungannya. Jangan kaitkan itu.” (M, Wawancara, 10 Juli 2023)

Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim juga menambahkan bahwa jika ada ketakutan terkait dengan fenomena plagiarisme, maka yang harus diperkuat adalah bimbingan terhadap peneliti. Sehingga menghasilkan karya ilmiah yang murni berdasarkan riset dari peneliti.

“Artinya kalau yang lain ketakutan, ketakutan misalnya ada ketakutan oh dengan plagiarisme berarti ya risetnya dong itu. Ya mulai pembimbingannya itu ya risetnya harus ditantang.” (M, Wawancara, 10 Juli 2023)

Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim lebih lanjut menekankan bahwa kebijakan *open access* itu sebenarnya justru mendorong peneliti untuk meneliti dengan benar. Dorongan ini disebabkan oleh ketakutan jika tertangkap melakukan plagiasi pada karya ilmiahnya. Terlebih lagi saat ini sudah marak alat untuk mengecek plagiarisme atau *plagiarism checker*. Sehingga plagiasi dapat dideteksi dengan mudah.

Institutional repository milik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim sendiri sudah terintegrasi dengan layanan *plagiarism checker* yaitu Turnitin. Adanya integrasi dengan layanan *plagiarism checker* ini diharapkan peneliti yang mengunggah karya ilmiahnya pada *institutional repository* bisa

tenang akan publisitas karyanya, dan calon peneliti dapat berhati-hati serta selalu mematuhi etika riset.

Terkait dengan dampak buruk, tiga dari empat mahasiswa yang diwawancara menyatakan bahwa sebagai pemustaka yang mengunggah tugas akhir ke dalam *institutional repository* terdapat sedikit kekhawatiran akan adanya plagiarisme terhadap karyanya.

“*Pasti ada sih, lebih rentan kena plagiasi atau copas (copy paste). Karena saking mudahnya (akses) jadi banyak disalahgunakan, asal copas saja, jadi (tingkat) plagiasinya pasti tinggi*” (AD, Wawancara, 28 September 2023)

Narasumber lain menyatakan bahwa perilaku plagiarisme juga kembali kepada perspektif masing-masing individu. Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya mahasiswa yang benar-benar menulis dengan berdasarkan pada etika-etika penulisan dan riset. Di sisi lain juga terdapat oknum yang melakukan kecurangan dengan melakukan *copy-paste* dan tidak benar-benar mengerti etika riset.

“*Ada sih dampak buruknya, Cuma orang kan beda-beda ya ada yang benar-benar meng-copy dan tidak berusaha sendiri.*”(QS, Wawancara, 28 September 2023)

Namun di sisi lain pemustaka yang diwawancarai ini juga merasa sedikit tenang terkait kekhawatiran akan plagiarisme ini karena adanya layanan *plagiarism checker* yang disediakan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Layanan *plagiarism checker* ini juga terhubung dengan *institutional repository* milik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Dengan adanya layanan ini para narasumber berharap karya tulisnya yang berupa tugas akhir dapat terlindungi dari pelaku plagiarisme. Sehingga skripsi yang diunggah ke dalam *institutional repository* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti lain dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

4.2.2. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan

Kebijakan *open access* pada *institutional repository* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim ini tentu menemui tantangan dalam implementasinya. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim menyampaikan dalam sesi wawancara bahwa tantangan dari penerapan kebijakan *open access* pada *institutional repository* ini adalah masih adanya pemahaman-pemahaman yang tidak tepat terkait hal ini. Pemahaman yang tidak tepat ini berkaitan dengan persepsi peneliti yang takut akan plagiasi terhadap karya tulisnya.

“Ya memang pertama itu memang kita Bukan kesulitan, tapi tantangannya adalah pada pemahaman-pemahaman yang belum, belum apa istilahnya belum tepat terkait dengan open access begitu. Sehingga ada kekhawatiran, kekhawatiran nanti diplagiasi dan seterusnya begitu. Padahal justru dengan kita buka, maka orang lain akan takut melakukan plagiasi. Jadi mindsetnya harus dibalik begitu. Kalau saya berikan secara cuma-cuma, semua orang bisa membaca, banyak orang yang membaca maka orang mau memplagiasi, pasti gak mungkin gitu kan, takut ya. Beda kalau kemudian kita tutup, malah justru akan memberikan ruang bagi plagiasi.” (M, wawancara, 10 Juli 2023)

Namun ketakutan akan fenomena plagiarisme tersebut dirasa hanyalah tantangan awal saja. Saat ini tantangan yang dihadapi oleh Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim adalah bagaimana membangun dan mengembangkan platform *institutional repository* yang *sustainable* atau berkelanjutan. Selain itu tantangan lainnya adalah mengintegrasikan platform *institutional repository* milik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan pangkalan data atau *database institutional repository*.

“Nah pemahaman-pemahaman kayak gitu pada awalnya memang itu tantangan. Tantangan yang cukup kuat di awal-awalnya, tapi kemudian sekarang itu sudah tidak menjadi persoalan. Tidak menjadi sebuah tantangan begitu. Tapi justru tantangannya adalah bagaimana secara teknologi platform yang dikembangkan ini terus bisa sustainable. Kemudian bisa dikembangkan, tantangannya adalah mengembangkan platform ini, etthesis itu bisa terindeks oleh berbagai platform indeks. Beberapa tempat database indeks juga sudah.” (M, Wawancara, 10 Juli 2023)

Menyikapi tantangan ini Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim telah menjalankan beberapa upaya penanggulangan untuk menghadapi permasalahan tersebut. Upaya mengatasi tantangan tersebut di antaranya berupa pelatihan literasi informasi yang rutin dilaksanakan beberapa sesi dalam setiap bulan. Selain itu juga adanya pelatihan untuk memanfaatkan *plagiarism checker*. Pada sesi literasi informasi tersebut selalu disisipkan satu bab khusus untuk membahas topik terkait memahami plagiarisme dan cara menghindarinya.

Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim juga selalu mengembangkan fasilitas teknologi untuk mengintegrasikan platform *institutional repository* dengan platform indeks dan pangkalan data *institutional repository* global. Baru-baru ini langkah ini menjadikan *institutional repository* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim terindeks pada platform OATD (*Open Access Theses and Dissertations*). Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim berharap dengan terindeksnya *institutional repository* dapat memaksimalkan penyebarannya. Sehingga *institutional repository* tidak hanya dapat diakses di satu platform saja, namun juga muncul di berbagai platform indeks *database institutional repository*.

“Nah itu tantangannya adalah berkomunikasi antar platform. Bagaimana platform thesis itu berkomunikasi antar platform secara teknologi. Nah baru-baru ini kita dapatkan misalnya ke OATD. OATD itu sebuah database indeks open access basis disertasi di seluruh dunia. Itu ada sekitar 6 juta berapa lebih. Kita gabungkan di situ. Nah UIN Malang ini termasuk satu-satunya di Indonesia yang sudah bergabung. Artinya tantangan UIN Malang hari ini itu bukan persoalan pemahaman open access. Tetapi tantangannya adalah bagaimana platform atau thesis ini bisa berkomunikasi dengan platform-platform yang lain. Misalnya diindeks oleh OATD, kemudian diindeks oleh database indeks yang lain. Sehingga penyebarannya itu lebih maksimal, bisa diakses tidak lagi hanya dicari di satu tempat, tapi di berbagai indeks itu juga muncul.”

Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim menyatakan pandangannya mengenai kebijakan *open access* pada *institutional repository* bahwa kebijakan ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sarana menyebarkan ilmu pengetahuan dan dakwah Islam. Melalui kebijakan *open access*

ini, kajian keilmuan terkait integrasi sains dan Islam ataupun sains murni dapat diakses oleh masyarakat global. Selain itu juga kebijakan ini memiliki peran penting dalam rangka meningkatkan visibilitas institusi.

“yang paling utama adalah dakwah. Jadi bagian dari dakwah, bagian dari syiar, karena banyak karya-karya terkait dengan keislaman, integrasi Islam dan sains itu. Dari kajian-kajian itu biar bisa lebih banyak dibaca oleh masyarakat global. Tidak hanya kalangan muslim tetapi non-muslim yang mau mempelajari Islam bisa dari hasil risetnya mahasiswa dan dosen. Nah ini harus diberikan ruang, jadi open access ini memberikan visibilitas universitas, memberikan dampak pada peningkatan memahami, mengenal UIN Malang, juga mengenal secara individu para pendidiknya, mahasiswa, dosen begitu ya. Itu yang penting sehingga ini akan tetap menjadi satu layanan yang terus ditingkatkan.” (M, wawancara, 10 Juli 2023)

Perkembangan kebijakan *institutional repository* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dapat dibagi menjadi 2 (dua) periode. Periode pertama adalah periode awal perumusan kebijakan seiring dengan berdirinya *institutional repository* di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim di tahun 2010. Pada tahun awal berdirinya, *institutional repository* di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim masih menerapkan kebijakan *closed access*. Kemudian setelah satu tahun berlalu, di tahun 2011 perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim mulai beralih kepada *open access*.

Jika diukur dengan siklus kebijakan, maka tahap identifikasi masalah dilakukan dengan menentukan isu yang akan diangkat menjadi kebijakan. Dalam hal ini yang menjadi *concern* atau masalah dari Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim adalah bagaimana menjalankan fungsi utama perpustakaan sebagai sarana untuk membantu penyebaran informasi. Soalan kedua adalah adanya kampanye kesadaran akan pentingnya *open access*.

Berangkat dari identifikasi masalah tersebut, Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim merancang sebuah agenda untuk menyusun strategi potensial dalam menerapkan kebijakan untuk *institutional repository*nya. Rancangan kebijakan tersebut kemudian diajukan kepada Rektor Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim. Proses perancangan kebijakan ini masuk pada tahapan perumusan kebijakan.

Perumusan kebijakan yang dilakukan bersama Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim menghasilkan payung hukum berupa Surat Keterangan Rektor Un.03/PP.00.0/55/2011. Tahapan ini merupakan tahapan pengesahan kebijakan. Menurut Fitriani (2017) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim merupakan perpustakaan kedua yang menerapkan kebijakan *open access* di antara perpustakaan perguruan tinggi lain di Indonesia. Setelah melakukan implementasi selama satu tahun, di tahun 2012 terjadi perubahan terhadap kebijakan *institutional repository*. Fitriani (2017) menyatakan bahwa evaluasi dilakukan karena terdapat pergantian manajemen universitas. Pergantian kebijakan dilakukan karena adanya perbedaan pendapat antara pihak perpustakaan dan dosen. Perbedaan pendapat ini didasari atas kekhawatiran dosen akan fenomena plagiarisme. Atas penolakan ini kebijakan *open access* terpaksa harus dihentikan untuk sementara waktu.

4.3. Pembahasan

Implementasi Kebijakan menurut Ginting & Noor (2015) menyebutkan bahwa terdapat tiga poin untuk menganalisis proses implementasi pada suatu kebijakan. Poin pertama adalah adanya pertimbangan dibuatnya kebijakan atau keputusan, baik oleh aktor politik, pejabat pemerintahan atau aktor lainnya. Pertimbangan penyusunan kebijakan atau keputusan ini bertujuan untuk menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat. Mufid dan Zuntriana (2015) menyatakan dalam makalahnya bahwa dalam sejarahnya kebijakan *institutional repository* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim banyak mengalami perubahan sejak awal pengembangannya.

Awal berdirinya *institutional repository* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim pada tahun 2011 kebijakan yang diterapkan adalah *open access* secara penuh dan dapat diunduh dengan bebas. Pada tahun-tahun berikutnya yaitu tahun 2012 hingga tahun 2013 kebijakan akses pada *institutional repository* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim terbatas pada bagian abstrak.

Sedangkan pada tahun 2014 hingga 2015 kebijakan *institutional repository* berubah menjadi akses melalui mode *viewer*. Rangkuman perkembangan kebijakan *institutional repository* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. 2 Perkembangan Kebijakan IR UIN Maulana Malik Ibrahim

Tahun	Jenis Kebijakan Akses	Dokumen Legal Pendukung
2010	<i>Closed access</i>	-
2011	<i>Open access</i> secara penuh dan dapat diunduh	SK Rektor Un.03/PP.00.0/55/2011
2012-2013	Terbatas hanya pada bagian abstrak	-
2014-2015	Akses melalui mode <i>viewers</i>	-
2015 hingga sekarang	<i>Open access</i> secara penuh dan dapat diunduh	SK Rektor Un.03/PP.00.9/690/2015

(Sumber: olah data penelitian, 2023)

Perkembangan kebijakan *institutional repository* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim terjadi akibat pendapat perbedaan kepentingan antara berbagai pihak mengenai konsep *open access*. Pihak dosen berkepentingan untuk melindungi karya tulisnya. Sedangkan manajemen universitas memandang dengan adanya kebijakan *open access* diharapkan dapat mendukung pemeringkatan perguruan tinggi. Sebagai mana yang telah disinggung sebelumnya bahwa *institutional repository* menjadi salah satu aspek media penerbitan daring yang dinilai oleh Webometrics. Pihak perpustakaan berkepentingan untuk melaksanakan fungsi perpustakaan yaitu penyebaran informasi secara luas melalui kebijakan *open access* pada *institutional repository*.

Berdasarkan proses dalam rangka merumuskan kebijakan *institutional repository*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim menerapkan teori pilihan publik. Teori pilihan publik atau *public choice* menurut Buchanan (dalam Ginting & Noor (2015) menyatakan teori ini berasumsi bahwa publik umumnya dituntun oleh ketertarikan dan kepentingan pribadi. Sehingga teori ini memandang kebijakan merupakan sebuah proses formulasi keputusan secara kolektif dari individu-individu yang berkepentingan atas keputusan tersebut. Dalam hal ini yang berkepentingan dalam penyusunan kebijakan *institutional repository* adalah dosen sebagai perwakilan dari pihak pemustaka, pustakawan sebagai pihak pengelola, dan

juga manajemen universitas. Kepentingan masing-masing pihak di antaranya adalah dosen sebagai perwakilan dari pihak pemustaka memiliki kepentingan untuk melindungi karya ilmiahnya dari pelanggaran berupa plagiarisme, perpustakaan sebagai pihak pengelola memiliki kepentingan dalam menjalankan fungsi utamanya yaitu menyediakan sumber informasi bagi pemustaka dan pihak manajemen universitas memiliki kepentingan untuk memajukan pemeringkatan universitas melalui *institutional repository*.

Dapat diketahui bahwa dalam penerapannya *institutional repository* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim sudah menerapkan pertimbangan kebijakan atau keputusan dengan alasan yang jelas. Pertimbangan dalam penyusunan kebijakan didapatkan dari hasil mediasi antara pihak-pihak yang berkepentingan atas keputusan tersebut. Dari perspektif perpustakaan, dasar yang menjadi penyusun kebijakan adalah semangat untuk menyebarkan keilmuan dan pengaruh kampanye *open access* pada tahun 2010 silam. Keputusan untuk menerapkan kebijakan *open access* pada *institutional repository* ini kemudian diajukan kepada Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dan mendapatkan landasan legal di tahun 2015 berupa Surat Keputusan Rektor No. Un.03/PP.00.9/6 90/2015 tentang Publikasi Karya Ilmiah.

Keputusan untuk menerapkan kebijakan *open access* ini kemudian mempengaruhi kehidupan masyarakat akademis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Kebijakan *open access* ini memungkinkan masyarakat akademis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim mengakses *institutional repository* secara terbuka. Sehingga memudahkan dalam mengakses sumber daya informasi yang ada. Keputusan untuk mengimplementasikan kebijakan *open access* pada *institutional repository* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim juga bertujuan untuk penyebaran ilmu pengetahuan dan informasi secara luas, bahkan hingga menjangkau *audiens* global. Tujuan ini diwujudkan dengan selalu pro-aktif pada perkembangan teknologi dan mengintegrasikan *institutional repository* dengan platform indeks atau *database repository*. Kepala Perpustakaan Universitas

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim sendiri memandang penerapan kebijakan ini merupakan sarana untuk meningkatkan visibilitas instansi serta dakwah Islam.

Poin kedua adalah adanya keluaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan ini menuntut aktor atau pemerintah untuk melaksanakan peraturan, penyanggahan, pembentukan personil dan pembuatan regulasi dalam program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Berdasarkan variabel ini dapat diketahui dalam implementasinya Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim telah menerapkan kebijakan *open access* selama 14 (empat belas) tahun hingga saat ini. Kebijakan ini diterapkan pada semua level masyarakat akademik, baik kepada dosen ataupun mahasiswa.

Meski implementasi kebijakan *open access* ini sudah diterapkan, dalam pelaksanaannya Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim juga mengalami penyanggahan, utamanya dari pemustaka yaitu mahasiswa dan dosen. Penyanggahan yang dilakukan oleh dosen seperti yang disebutkan dalam Mufid & Zuntriana (2015) didasari oleh kekhawatiran akan plagiarisme. Penyanggahan serupa juga dilakukan oleh mahasiswa dengan kekhawatiran yang sama. Melalui adanya penyanggahan ini Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim berupaya memediasi pemustaka melalui langkah sosialisasi yang rutin.

Adanya kebijakan *open access* pada *institutional repository* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim ini membuat perpustakaan harus menyusun strategi implementasi yang baik. Strategi implementasi kebijakan ini dapat dilihat dari pembentukan personil, langkah promosi dan sosialisasi, penyusunan regulasi dan evaluasi. *Institutional repository* sendiri berada dalam naungan bagian pengembangan koleksi di struktur organisasi dengan pengawasan dari kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Selain membuat struktur organisasi khusus *institutional repository*, Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim juga menyusun regulasi untuk pemustaka atau pengguna berupa SOP (*Standard Operational Procedure*). SOP ini dapat diakses dengan mudah melalui situs web Perpustakaan

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Langkah unggah mandiri tugas akhir dan karya ilmiah juga dapat diakses pada situs web *institutional repository*, baik untuk dosen maupun untuk mahasiswa.

Home » Bebas Pustaka » How to Self-Deposit on e-Theses [Skripsi/ Tesis/ Disertasi]

How to Self-Deposit on e-Theses [Skripsi/ Tesis/ Disertasi]

Pedoman Unggah Tugas Akhir Secara Mandiri

Langkah-langkah dalam unggah mandiri tugas akhir mahasiswa [Skripsi/Tesis/Disertasi] di etheses.uin-malang.ac.id

Prosedur deposit mandiri untuk mahasiswa:

1. Mahasiswa membuat akun terlebih dahulu di etheses.uin-malang.ac.id dengan menggunakan email mahasiswa. Jika belum aktif, Mahasiswa dapat mengaktifkan email mahasiswa melalui [Siakad](#). Pedoman cara aktivasi tersedia di [FAQ](#) yang telah disusun oleh PTIPD (Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. File tugas akhir yang diunggah dalam format PDF sesuai dengan format [Pedoman](#) masing-masing.

Gambar 4. 2 Pedoman Unggah Mandiri IR UIN Maulana Malik Ibrahim
(Sumber: Situs Web Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)

Poin terakhir adalah adanya dampak dari implementasi kebijakan yang dipilih sebagai efek dari pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dampak positif dengan adanya kebijakan *open access* pada *institutional repository* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim adalah membantu perkembangan penelitian dalam lingkup universitas maupun luar universitas. Adanya perkembangan penelitian dan keilmuan ini merupakan efek dari berkurangnya repetisi dalam penelitian. Adanya *institutional repository* yang terbuka membuat masyarakat akademik dapat mengakses sumber daya informasi sebanyak-banyaknya untuk rujukan penelitian. Masifnya sumber daya informasi ini tentu saja memunculkan penelitian-penelitian baru yang sesuai dengan perkembangan zaman dan mengandung unsur pembaharuan.

73	5090	Universitas Medan Area	1358	1947	7237
74	5092	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	1475	1584	7237
75	5105	Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	2900	8183	5709
76	5124	Universitas Islam Negeri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	1484	1799	7237
77	5169	Universitas Katolik Soegijapranata	1196	3332	7237
78	5173	Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	1692	1657	7237
79	5195	Universitas Jambi	1483	8183	6291
80	5224	Universitas Komputer Indonesia UNIKOM	2555	8183	5957
81	5226	Universitas Esa Unggul (Universitas Indonusa)	1564	2460	7237
82	5275	Politeknik Negeri Lhokseumawe	1302	3928	7237
83	5279	Institut Agama Islam Negeri IAIN Palangka Raya	1360	3728	7237

Gambar 4. 3 Ranking Webometrics IR UIN Maulana Malik Ibrahim
(Sumber: Situs Web Webometrics, <https://www.webometrics.info/en/asia/indonesia%20>)

Penerapan kebijakan *open access* pada *institutional repository* dinilai tidak memiliki dampak negatif jika dimanfaatkan dengan bijaksana. Pengguna atau pemustaka harus paham batas-batas *open access*, memiliki integritas dan paham etika riset. Kekhawatiran akan adanya fenomena plagiarisme ini tidak dipungkiri ada, namun bukan berarti menjadi dampak negatif dan menghalangi pengembangan *institutional repository* dan semangat menyebarkan pengetahuan. Fenomena ini haruslah ditanggapi dengan bijak agar *institutional repository* dapat bermanfaat bagi semua masyarakat akademik. Upaya penanggulangan akan plagiarisme juga dilakukan oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan menyediakan literasi informasi pada pemustaka. Terlebih lagi *institutional repository* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim sudah terintegrasi dengan perangkat lunak *plagiarism checker*. Sehingga fenomena ini sudah tidak menjadi tantangan atau kekhawatiran bagi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan *open access* pada *institutional repository* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim saat ini adalah agar dapat mengembangkan *institutional repository* sehingga dapat *compatible* dengan berbagai platform indeks. Selain itu juga yang menjadi pekerjaan rumah saat ini adalah menyajikan seluruh koleksi tahun 2010 hingga tahun 2018 sebelum kebijakan unggah mandiri diterapkan. Usaha panjang ini masih terus diupayakan oleh Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim agar seluruh koleksi tugas akhir yang dimiliki perpustakaan dapat juga diakses melalui platform daring *institutional repository*.

Tantangan yang dihadapi oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dalam rangka implementasi kebijakan *institutional repository* ini cukup berbeda dengan tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi lain. Safira (2021) menyatakan dalam penelitiannya berbagai institusi memiliki pendapat yang berbeda dalam hal tantangan yang dihadapi. Di antara tantangan tersebut adalah 1) Adanya perbedaan pandangan pimpinan institusi terkait dengan *open access*, 2) Adanya keterbatasan staf dan sumber daya yang dimiliki perpustakaan dalam rangka implementasi *open access*, 3) Adanya keputusan peneliti untuk mempublikasikan karya ilmiahnya melalui media sosial, dan 4) Adanya upaya mengurangi biaya operasional perpustakaan.

Langkah terakhir berdasarkan siklus kebijakan atau *policy cycle* merupakan evaluasi. Menurut Jann dan Wegrich dalam Fischer (2007) menyatakan bahwa evaluasi terhadap kebijakan menempati posisi penting dalam kajian kebijakan. Evaluasi ini memungkinkan penilaian terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan dan memutuskan apakah kebijakan tersebut akan terus dilanjutkan atau diberhentikan. Karena sejatinya kebijakan diterapkan adalah untuk mengatasi atau sedikitnya mengurangi masalah yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim belum pernah secara resmi melakukan evaluasi kebijakan *open access* pada *institutional repository* terhadap pemustaka, utamanya mahasiswa sebagai pengguna. Selama 14 (empat belas) tahun implementasinya, evaluasi kebijakan *open access* pada *institutional repository* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim hanya difokuskan pada pihak manajemen perguruan tinggi dan dosen saja. Evaluasi kebijakan ini penting sekali dilakukan, mengingat tahapan ini bukan hanya tahapan akhir saja, namun menjadi siklus yang harus dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Evaluasi kebijakan diharapkan dapat menemukan kembali masalah-masalah kebijakan,

program-program yang akan diusulkan untuk menyelesaikan permasalahan, implementasi kebijakan, dan kajian akan dampak-dampak kebijakan.

4.4. Implementasi Kebijakan *Open Access* pada *Institutional Repository* dan korelasinya dengan Sains dan Islam

4.4.1. Kebijakan *Open Access* pada *Institutional Repository* dalam Perspektif Sains dan Islam

Open access sejatinya adalah upaya untuk menyediakan sumber daya informasi secara terbuka sehingga dapat diakses dan dimanfaatkan oleh khalayak luas. Keterbukaan akses pada *institutional repository* ini juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan akademis yang terjadi akibat adanya biaya berlangganan untuk mengakses informasi. Prinsip *open access* adalah diseminasi informasi secara luas dan kemudahan akses pada perkembangan ilmu pengetahuan dan riset. Diseminasi informasi dalam Islam sendiri telah dilakukan sejak masa nabi dan rasul. Menurut Ahmed dalam Fahri (2008) diseminasi informasi dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan menyampaikan wahyu atau ajaran Islam kepada para sahabat dalam perkumpulan yang biasa disebut *Majlis Nabi*.

Prinsip *open access* dengan visi menyebarkan ilmu pengetahuan selaras dengan Surat Ali Imran ayat 187 yang berbunyi:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا
قَلِيلًا قَلِيلًا فَيُبْسِ مَا يَشْتَرُونَ

Artinya: (Ingatlah) ketika Allah membuat perjanjian dengan orang-orang yang telah diberi Alkitab (dengan berfirman), “Hendaklah kamu benar-benar menerangkan (isi Alkitab itu) kepada manusia dan janganlah kamu menyembunyikannya.” Lalu, mereka melemparkannya (janji itu) ke belakang punggung mereka (mengabaikannya) dan menukarnya dengan harga yang murah. Maka, itulah seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan.

Menurut tafsir Kementerian Agama (2023) pada ayat tersebut dijelaskan gangguan dan tipu daya orang-orang Yahudi terhadap Nabi, pada ayat ini Allah menjelaskan kelengahan dan pengabaian mereka terhadap ajaran Taurat. Ingatlah ketika Allah mengambil janji yang kuat berupa aturan-aturan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberi Kitab, berupa perintah, “Hendaklah kamu

benar-benar menerangkannya, yakni isi Kitab itu, kepada manusia, tentang amar makruf nahi mungkar, halal dan haram sebagaimana termaktub dalam kitab suci yang diturunkan dari Allah. Diperintahkan pula janganlah kamu menyembunyikannya, yakni isi kandungan kitab suci tersebut, seperti berita kedatangan Nabi Muhammad, dan hukum-hukum syariat tentang halal dan haram. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dengan tidak mengindahkan perintah-perintah Allah serta mengabaikan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan bahkan mereka menjualnya dengan harga murah. Mereka mengubah ketentuan hukum yang telah ditetapkan Allah untuk kepentingan sekelompok orang berpengaruh demi mendapatkan imbalan duniawi. Maka itu seburuk-buruk jual-beli yang mereka lakukan karena mereka rela menukar kemuliaan ilmu, agama, pujian di sisi Allah serta mahluk-Nya, dan kekekalan di surga yang penuh nikmat, dengan kesenangan duniawi yang fana.

Allah telah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan perantaraan nabinya masing-masing, bahwa mereka akan menerangkan isi Kitab kepada manusia dengan menjelaskan arti yang terkandung di dalamnya latar belakang diturunkannya dan tidak ada yang disembunyikan. Tetapi yang terjadi adalah mereka tidak menepati sama sekali tentang janji-janji tersebut, malah mereka melemparkan janji itu ke belakang, menyembunyikan keterangan tentang Rasulullah SAW yang jelas tercantum di dalam Kitab mereka. Mereka menukar rida Allah SWT yang abadi dengan harga dan nilai yang sedikit yaitu kedudukan yang tidak kekal dan merusak. Alangkah keliru dan buruknya penukaran yang mereka lakukan itu.

Perawi Hadist at-Tirmidzi juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ أُجِمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ

Artinya: “Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka ia akan dibelenggu pada hari Kiamat dengan tali kekang dari Neraka”. (H.R. Abu Dawud dan At-Tirmidzi)

Berdasarkan penjabaran tafsir Surah Ali Imran ayat 187 dan Hadist tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penyebaran ilmu pengetahuan menjadi suatu keharusan dalam Islam. Penyebaran ilmu pengetahuan baik pengetahuan umum ataupun agama dapat membawa pada kebaikan dan kesadaran bagi manusia. Penyebaran ilmu pengetahuan dan informasi selaras dengan prinsip *open access* yaitu diseminasi informasi secara luas. *Open access* sendiri juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan akademik akibat tertutupnya sumber daya informasi yang disebabkan adanya biaya langganan atau biaya akses suatu *institutional repository*. Dengan adanya kebijakan *open access* ini diharapkan dapat membantu penyebaran ilmu pengetahuan secara luas, baik ilmu pengetahuan umum ataupun ilmu-ilmu agama.

4.4.2. Hukum Menganalisis Implementasi Kebijakan dalam Perspektif Islam

Analisis kebijakan menurut Ginting dan Noor (2015) adalah proses untuk memeriksa dan mendeskripsikan penyebab dan konsekuensi dari pemberlakuan kebijakan publik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa analisis kebijakan terfokus pada penjelasan akan kebijakan itu sendiri, bukan bagaimana menjadikan kebijakan tersebut layak. Pramono (2020) menyatakan bahwa dalam filsafat kebijakan (*policy philosophies*) memperkenalkan konsep pemerintahan pada masyarakat yang plural seperti di Indonesia dapat dilakukan dengan teori Brokerism. Teori Brokenism ini beranggapan bahwa masyarakat itu terdiri dari beberapa kelompok yang berkepentingan (*interest group*) dan pemerintah adalah alat perekat dari semua unsur kelompok tersebut, sehingga dapat menjadi kekuatan yang terintegrasi.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat bersifat wajib hukumnya dalam proses kebijakan di sebuah pemerintahan demokrasi. Jika hal ini dikaitkan dengan perspektif sebuah institusi pendidikan, maka masyarakat akademik disimpulkan dapat memberikan partisipasi dalam proses kebijakan yang ada. Kebijakan menurut Wahab (1991) dibuat untuk memecahkan masalah tertentu dan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang diinginkan. Dalam perspektif Islam sendiri tujuan dalam penyusunan dan pengimplementasian kebijakan adalah untuk kesejahteraan atau kemaslahatan

bersama. Pemerintah dalam hal ini harus menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan. Hal ini dilakukan semata agar kebijakan tersebut dapat memenuhi nilai keadilan dan membawa kebaikan bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan firman Allah SWT dalam Quran Surah Al-Ashr ayat 3 yang berbunyi:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۖ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

Artinya: *kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran.*

Tafsir Ringkas Kementerian Agama (2023) menjelaskan bahwa semua manusia rugi, kecuali orang-orang yang beriman dengan sejati dan mengerjakan kebajikan sesuai ketentuan syariat dengan penuh keikhlasan, serta saling menasihati satu sama lain dengan baik dan bijaksana untuk memegang teguh kebenaran sebagaimana diajarkan oleh agama dan saling menasihati untuk kesabaran dalam melaksanakan kewajiban agama, menjauhi larangan, menghadapi musibah, dan menjalani kehidupan.

Sedangkan menurut Tafsir *Tahlili* dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa jika manusia tidak mau hidupnya merugi, maka ia harus beriman kepada-Nya, melaksanakan ibadah sebagaimana yang diperintahnya, berbuat baik untuk dirinya sendiri, dan berusaha menimbulkan manfaat kepada orang lain. Di samping beriman dan beramal saleh, mereka harus saling nasihat-menasihati untuk menaati kebenaran dan tetap berlaku sabar, menjauhi perbuatan maksiat yang setiap orang cenderung kepadanya, karena dorongan hawa nafsunya.

Ayat tersebut menerangkan bahwa hendaknya manusia saling mengingatkan dan menasihati untuk kebaikan. Pada proses kebijakan ini analisis dilakukan untuk memeriksa dan mendeskripsikan kebijakan yang berlaku sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Hal ini dilakukan semata agar kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat dan dapat membantu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kebijakan adalah serangkaian keputusan atau kegiatan yang telah dipertimbangkan oleh pemerintah atau otoritas publik. Keputusan ini diambil untuk menyelesaikan masalah tertentu dan/atau untuk mencapai tujuan atau visi dan misi tertentu yang dikehendaki. Implementasi kebijakan pada *institutional repository* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim berlandaskan pada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim nomor Un.03/PP.00.9/690/2015 tentang publikasi karya ilmiah mahasiswa secara *fulltext*. Kebijakan yang diimplementasikan oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim adalah *open access* atau akses terbuka. Berdasarkan hasil penelitian dari “Analisis Implementasi Kebijakan *Institutional Repository* di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim” dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan *institutional repository* di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim mengalami perkembangan dari tahun 2010 hingga saat ini. Terdapat dua periode implementasi kebijakan. Periode pertama implementasi kebijakan *closed access* dan periode kedua adalah implementasi kebijakan *open access*. Pada periode *closed access* ditetapkan berdasarkan evaluasi oleh dosen karena adanya ketakutan akan fenomena plagiarisme. Periode *open access* diputuskan berdasarkan keputusan rektor sebagai hasil dari pertemuan pendapat pihak-pihak yang berkepentingan. Implementasi kebijakan *open access* ini sudah diterapkan sejak tahun 2015 hingga saat ini. Jika dianalisis berdasarkan teori Implementasi Kebijakan menurut Ginting & Noor (2015) ketiga poin dalam teori tersebut sudah terpenuhi. Pada implementasinya sudah ada pertimbangan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh aktor politik atau pemerintah sehingga mempengaruhi kehidupan

masyarakat. Hal ini yaitu keputusan untuk menerapkan kebijakan *closed access* atau *open access*. Poin selanjutnya adalah adanya keluaran dari kebijakan yang berupa *Standard Operational Procedure* (SOP), pembentukan personil dan layanan literasi informasi sebagai langkah sosialisasi. Poin terakhir adalah adanya dampak dari kebijakan yang diimplementasikan, baik dampak positif ataupun dampak negatif. Namun Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim menyadari bahwa belum melakukan evaluasi kepada pemustaka terkait implementasi kebijakan *open access* ini.

2. Implementasi kebijakan *institutional repository* di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim ini tentu saja tidak mudah dan melalui berbagai tantangan. Pada periode awal penerapan *institutional repository*, tantangan yang dihadapi adalah belum banyak perguruan tinggi yang menerapkan kebijakan *open access* dan adanya ketakutan akan fenomena plagiarisme. Saat ini tantangan yang dihadapi adalah menyediakan platform *institutional repository* yang *sustainable* dan dapat terintegrasi dengan berbagai *database* indeks *institutional repository*.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan saran yang dapat peneliti sampaikan adalah:

1. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim perlu mengadakan evaluasi kepada pemustaka terkait dengan implementasi kebijakan *open access* pada *institutional repository*nya. Hal ini dikarenakan implementasi bukan langkah terakhir dalam siklus kebijakan. Evaluasi kebijakan diharapkan dapat menemukan kembali masalah-masalah kebijakan, program-program yang akan diusulkan untuk menyelesaikan permasalahan, implementasi kebijakan, dan kajian akan dampak-dampak kebijakan.

2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait dengan implementasi kebijakan *institutional repository* dapat mengembangkan teori implementasi kebijakan yang lain. Teori implementasi kebijakan dalam hal ini berupa teori implementasi kebijakan yang lebih spesifik digunakan untuk menganalisis kebijakan informasi. Selain itu juga dapat menganalisis dampak dari implementasi kebijakan berdasarkan perspektif pemustaka yang lebih luas, yaitu dosen, staf atau bahkan pengguna di luar institusi.
3. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang melakukan pembahasan terkait implementasi kebijakan *institutional repository* di perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, T. & Leachman, C. (2020). Centering Accessibility: A Review of Institutional Repository Policy and Practice. *Journal of Librarianship and Scholarly Communication*. Vol. 8. DOI: <https://doi.org/10.7710/21623309.2383>.
- Bashir, S., Gul, S., Bashir, S., Nisa., N. T., & Ganaie, S. A. (2021). Evolution of institutional repositories: Managing institutional research output to remove the gas of academic elitism. *JoLiS: Journal of Librarianship and Information Science*. DOI: [10.1177/09610006211009592](https://doi.org/10.1177/09610006211009592)
- Case, D. O. & Given, L. M. (2016). *Looking for Information: A Survey of Research on Information Seeking, Needs, and Behavior*. Emerald Group Publishing.
- Conte, Sarah. (2018). *Making the Choice: Open Access vs. Traditional Journals AJE*. <https://www.aje.com/arc/making-the-choice-open-access-traditional-journals/> (diakses pada tanggal 1 Maret 2023)
- Darwanto. Utami, A. K. T. , & Gusniawati, N. (2015). *Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Datareportal.com. (2023). *Digital 2023: Indonesia*. <https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia> (diakses pada 17 Februari 2023)
- Djanuardi. (2020). *Nilai-nilai Ajaran Islam di Masa New Normal dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*. Berita Seminar: Kantor Komunikasi Publik Universitas Padjajaran. <https://www.unpad.ac.id/2020/08/ajaranislam-banyak-diadopsi-oleh-hukum-indonesia/> diakses pada 11 Oktober 2023
- Dye, T. R. (1981). Policy Analysis. *The American Review of Public Administration*, 15(1), 58–59. <https://doi.org/10.1177/027507408101500108>.
- Ejikeme, A. N., & Ezema, H. J. (2019). The Potentials of Open Access Initiative and the Development of Institutional Repositories in Nigeria: Implications for Scholarly Communication. *Publishing Research Quarterly*, 8.
- Fahri, I. (2008). Metodologi Transmisi Keilmuan Islam Klasik: Upaya Reaktualisasi Metodologi Pengajaran. *Lembaran Ilmu Pendidikan*. Jilid 37, No. 1
- Faibisoff, S. G., & Ely, D. P. (1974). Information and Information Needs. In *Commisioned Paper Project, Teachers College, Columbia University*. School of Library Service, Columbia University. <https://doi.org/10.32388/268177>.
- Fischer, F., Miller, G. J. & Sidney, M. S. (2007). *Handbook of public policy analysis: teori, politics, and methods*. Amerika: Taylor & Francis Group.
- Fitriani, D. N. (2017). Studi Kasus Peran Pustakawan dalam Penerapan Open Access di Perpustakaan UIN Malang. *ACARYA PUSTAKA: Jurnal Ilmiah Perpustakaan dan Informasi*. DOI: <https://doi.org/10.23887/ap.v3i2.13057> diakses pada 10 Oktober 2023
- Ginting, R., & Noor, M. (2015). *Kebijakan Publik*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press. <https://eprints.upgris.ac.id/305/1/8.%20BUKU%20AJAR%20KEBIJAKAN%20PUBLIK.pdf> (diunduh pada tanggal 17 Februari 2023).

- Handoyo, E., & Istiarni, A. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Open Access di Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri : Studi Kasus Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri di Jawa Tengah. *Visi Pustaka*, 22(1), 17–28.
- Ichsan, N. (2009). Keistimewaan Syariat Islam. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta*. Vol. X No. 2. Hlm. 199-209
- Jones, R. E., Andrew, T., & MacColl, J. (2006). *The Institutional Repository*. Elsevier.
- Kementerian Agama Indonesia. (2023). Tafsir Surah Ali Imran. *Qur'an Kemenag*. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=1&to=200> (diakses pada tanggal 20 September 2023 pukul 13.00 WIB)
- Mawardi, A. & Khalifurrahman. & Fathurrahman. (2016). “*Al Ahkam Ash Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam (Terjemah)*”. Jakarta: Qisthi Press
- Mufid, & Zuntriana. A. (2015). Program Malang Inter Library Loan (MILL) menuju Konsorsium Repository Institutional Universitas Negeri di Kota Malang. *Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia*. <http://repository.uinmalang.ac.id/459/1/KPDI8%20%5BMufidAri%20Zuntriana%5D.pdf> diakses pada 30 September 2023
- Nasar, M. F. (2021, May 1). *Opini: Al-Quran dan Ilmu Pengetahuan*. Diambil kembali dari Kementerian Agama Republik Indonesia: <https://kemenag.go.id/opini/al-quran-dan-ilmu-pengetahuan-eeubhf>
- Novianto, A. Q. (2020). Repositori Institusi dan Kontribusinya dalam Meningkatkan Reputasi Universitas (Studi di UPT Perpustakaan Universitas Negeri Malang). *Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia*, 3(2), 95–116. <https://journal.uin.ac.id/Buletin-Perpustakaan/article/view/16979>
- Oktavia, A. (2019). Kebijakan Akses Terbuka (Open Access) Terhadap Layanan Repositori Institusi. *Sahut Al-Maktabah: Jurnal Perpustakaan, Arsip, Dan Dokumentasi*, 11(1), 67–76. <https://doi.org/10.15548/shaut.v11i1.129>
- Okwu, E., & Obi, B. (2022). Library Policies for 21st Century Reference Service Delivery: Its Implication For Post Covid-19 Era. *British Journal of Library and Information Management*, 2(1), 18–28. <https://doi.org/10.52589/bjlimogijqoao>.
- Pamungkas, F. J., Bahtiar, F. S., & Puspitadewi, G. C. (2020). Bagaimana Membuat Desain Teknologi Informasi Berdasarkan Aspek Ergonomis di Perpustakaan Universitas. *LIBTECH: Library and Information Science Journal*. Vol. 1, No. 1. <https://doi.org/10.18860/libtech.v1i1.10091>
- Pendit, P. L. (2008). *Perpustakaan Digital: Dari A sampai Z*. Jakarta: Cita Karyakarsa Mandiri.
- Pramono, Joko. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Solo: UNISRI Press
- Reitz, J. M. (2000). ODLIS: Online Dictionary of Library and Information Science. *Electronic Resources Review*, 4(10), 124–124.

- <https://doi.org/10.1108/err.2000.4.10.124.107>Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Safira, F. (2021). Kebijakan Open Access Repositori Institusi di Perpustakaan Perguruan Tinggi: Kajian Best Practice Studi Literature. *Pustakaloka: Jurnal Kajian Informasi Dan Perpustakaan*, Volume 13. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.
- Shah, U. U. (2020). Open Access Repositories in the World: An Overview. *Library Philosophy and Practice*, 2020, 1–13.
- Shihab, M. Q. (2005). Tafsir Al-Misbah (Kesan, Pesan dan Keserasian Al-Qur'an) Jilid 1. In *Lentera Hati*.
- Sholeh, M. I. (2023). Relevansi dan Tantangan Implementasi Hukum Islam dalam Konteks Sosial Masyarakat Modern. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*.
<https://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/assalam/article/view/484/445> diakses pada 11 Oktober 2023
- Suaib, H., Rakia, A., Purnomo, A., & Ohorella, H. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik*. Makassar: Humanities Genius
- Sudarsa, A. S. (2022). Kebijakan Publik dalam Perspektif Islam. Artikel: Djuanda University. <https://www.unida.ac.id/artikel/kebijakan-publik-dalam-perspektif-islam> diakses pada 09 Oktober 2023
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Bandung: Alfabeta.
- Ulum, A. & Setiawan, E. (2016). Analisis Konten dan Kebijakan Akses *Institutional Repository*. *Pustakaloka*. Vol. 8 No. 1.
- Undang-undang No. 43 Tahun 2007 Tentang *Perpustakaan*. (2007).
- Utomo, T. W. (2021). Kebijakan Publik dalam Perspektif Islam. <https://www.slideshare.net/triwidodowutomo/kebijakan-publik-dalam-perspektif-islam> diakses pada 09 Oktober 2023
- Velmurugan, C. (2014). Open Access and Institutional Repositories with special reference to Free Open Access and Institutional Repositories with special reference to Free Institutional Repository Software for Digital Libraries. *Proceeding of National Conference on Information Management in the India, July 2014*.
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Warner, S. (2003). E-prints and the Open Archives Initiative. *Library Hi Tech*, 21(2), 151–158. <https://doi.org/10.1108/07378830310479794>.
- Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: MNC Publishing.
- Yuventia, Y. (2012). “Standarisasi” Perpustakaan Perguruan Tinggi. UPT Perpustakaan & UNDIP Press. Universitas Diponegoro.
<https://digilib.undip.ac.id/2012/06/14/standarisasi-perpustakaan-perguruan-tinggi/> (diakses pada tanggal 10 Februari 2023).

LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon/Faksimile (0341) 558933
Website: <http://saintek.uin-malang.ac.id>, email: saintek@uin-malang.ac.id

Nomor : B-118.O/FST.01/TL.00/06/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Penelitian

Yth. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144

Dengan hormat,
Sehubungan dengan penelitian mahasiswa Jurusan Perpustakaan dan Ilmu Informasi
Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang atas nama:

Nama : AULIA MI'ROJTIN FIRDAUS
NIM : 19680020
Judul Penelitian : ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INSTITUTIONAL
REPOSITORY: STUDI MULTISITUS PADA PERGURUAN TINGGI
KEISLAMAN DI KOTA MALANG
Dosen Pembimbing : FIRMA SAHRUL BAHTIAR,S.Kom.,M.Eng

Maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin pada mahasiswa tersebut untuk
melakukan penelitian di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang dengan waktu pelaksanaan pada tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan 06 Juli 2023.

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Malang, 12 Juni 2023
a.n Dekan

Scan QRCode ini



untuk verifikasi surat



Anton Prasetyo, M.Si

NIP. 19770925 200604 1 003

Lampiran 2

Transkrip Wawancara

HASIL WAWANCARA KEPALA PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

10 JULI 2023

- Bagaimana sejarah atau berdirinya *repository* UIN? Tahun berapa *repository* didirikan?

“Jadi sebetulnya repository uin malang itu sudah dibangun tahun 2010 ya, yaitu dengan membangun sebuah platform sendiri. Repository itu khusus untuk tugas akhir. Kemudian tahun 2013, platform yang dibuat sendiri oleh perpustakaan itu karena platformnya tidak compatible dengan google scholar, sehingga kemudian berganti platform yang digunakan. Tahun 2013 itu kita menggunakan platform untuk tugas akhir ya. Termasuk juga untuk karya tulis dosen, begitu. Namun untuk implementasinya untuk repository dosen itu baru tahun 2015. Itu bisa dimulai untuk mengarsip ya. Untuk tahun 2015 itu kita sudah mulai mengarsip. Jadi nanti bisa dilihat di statistik repository itu, paling awal tahun berapa ya berarti itu. tahun 2013 itu sudah mulai menggunakan e-thesis. di antara tahun 2013 atau 2014 itu ya, itu sudah mulai masuk dimasukkan (karya tulis). Jadi tahun 2013 itu sudah mulai tentang mempelajari platform baru yang namanya Eprints itu ya. Itu dipelajari, digunakan dan kemudian dikembangkan.”

- Apakah sekarang menggunakan platform Eprints?

“Sekarang Eprints”

- Atas inisiasi siapakah keputusan untuk akhirnya menetapkan menjadi *open access* di *institutional repository* itu?

“Ya dari perpustakaan. Jadi dari perpustakaan menginisiasi itu untuk Open access ya. Karena gelombang kesadaran untuk secara global ya istilahnya mengampanyekan open access itu di tahun 2010 itu sesungguhnya. Sehingga UIN Malang di tahun 2010 itu kita open-kan semua. Namun karena tidak kompatibel itu kemudian beralih ke Eprints. Nah di awal-awal itu kita tidak

mengantongi yang namanya payung hukumnya kemudian tahun 2015 itulah repository itu memiliki payung hukum dari sisi keputusan Rektor. Jadi pada awalnya yang masih disimpan di platform yang lama ya. Mulai tahun 2015 itu semua karya dosen dan mahasiswa itu itu wajib di simpan di repository.”

- Berarti dari tahun awal pembentukannya itu sudah *open access* ya?

“Iya, open access kita. Kemudian tahun 2015 kita mendapatkan kekuatan legal formalnya dari Pak Rektor. Terkait dengan kewajiban mahasiswa dan dosen untuk membuka itu (karya tulis di repository).”

- Apa tujuan dari penerapan kebijakan *open access* di *institutional repository* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim?

*“Sesungguhnya perpustakaan itu fungsi utamanya menyebarkan ilmu pengetahuan, jadi itu juga selaras dengan semangat Islam. Kita sebagai salah satu unit yang memiliki fungsi itu maka kita harus memberikan akses seluasluasnya kepada publik untuk bisa mengakses resources dalam hal ini repository yaitu secara *open access*.*

Dulu seluruh karya mahasiswa kan juga bisa diakses secara penuh tapi melalui konvensional yaitu kan datang ke perpustakaan. Siapa pun kalau datang ke perpustakaan kan bisa mengakses skripsi dari halaman pertama sampai halaman terakhir.

Kita memberikan layanan yang namanya layanan skripsi ada ruangan itu kan namanya secara on-site atau secara offline-nya, jadi kan bisa datang secara fisik untuk bisa berkunjung ke perpustakaan mendapatkan skripsi tesis disertasi dan itu bisa tidak ada batasan mengaksesnya. Batasannya hanya harus jam kerja begitu kan. Nah dengan adanya teknologi sesungguhnya yang bisa diakses oleh publik ini kan tinggal di online kan.

Kan sama saja hanya beda ruangnya kan. Kalau pertama itu ruangnya terbatas secara fisik, kita juga tetap full-text ya, tidak ada yang ditutup-tutupi semua bisa mengakses. Kemudian dengan adanya teknologi, ya kita buka lagi. Kenapa kita harus tutupi. Jadi hanya beda tempat, kalau ini basic, kalau ini elektronik ya sama saja, kita berlakukan sama. Kalau basicnya full access, elektroniknya juga full access.

Ada yang kemudian menutup sebagian ya, itu keputusan masing-masing perguruan tinggi ya. Tetapi di perpustakaan UIN Malang kita kasih full access, kecuali ada permintaan misalnya itu data-data yang kemudian terkait dengan privasi ya. Misalnya ada terkait dengan perusahaan yang nanti ada urusannya dengan data-data itu, maka kita beri akses terbatas. Tapi kalau selagi itu tidak ada data yang privasi, ya itu kita buka semua, karena semangatnya adalah, semangat tabligh. Menyebarkan keilmuan, ilmu pengetahuan secara luas. Itu tujuan perpustakaan menampung, mengarsip koleksi.

Jika kemudian koleksinya dibatasi itu percuma gitu kan itu menyalahi semangat didirikannya perpustakaan.”

- Ada berapa jumlah koleksi *institutional repository* milik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim?

“Sudah, mungkin sudah hampir 40-an ya. Dosen itu sekitar di atas 10 ribu ya. Kemudian, apa, skripsi itu di atas 26 ribu. Coba nanti langsung dicek aja di ethesis sama di repository

Jadi ada 2 tempat repository itu. Repository untuk karya dosen, namanya repository alamatnya itu di e-resource UIN Malang itu. Kemudian untuk tugas akhir mahasiswa namanya ethesis di UIN Malang.”

- Apakah ada struktur organisasi khusus dalam rangka pengelolaan *institutional repository*?

“Jadi ada repository itu bagian dari pengembangan koleksi ya. Bagian dari pengembangan koleksi Nah itu ada petugas-petugas yang menjadi penanggung jawab di repository dan untuk mahasiswa dan dosen itu ya. Yang melaksanakan atau yang mengarsipkan itu itu ya dosen dan mahasiswa secara mandiri. Jadi perpustakaan hanya sebagai verifikator. Jadi untuk melihat memverifikasi data, kebenaran metadatanya, ya visibilitasnya. Kemudian baru diaktifkan jadi bukan perpustakaan. Dulu sempat perpustakaan yang mengunggah ya. Tapi kemudian itu kurang efektif. Kemudian kita sejak tahun 2020 Jadi tahun 2010 sampai tahun 2019 itu unggah mandiri Tahun 2020, unggah mandiri, diunggah oleh petugas.

Jadi petugas perpustakaan atau perpustakaan itu yang mengunggah. Sekarang mulai tahun 2020 sampai sekarang itu karena kita melakukan hasil evaluasi Itu maka kita berubah sistem pengunggahnya, yaitu secara mandiri. Jadi nanti kan, kamu itu kalau mau selesai kan wajib mengunggah skripsi itu secara mandiri. Termasuk dosen dan seterusnya itu ya diunggah secara mandiri.”

- *Siapakah yang mengawasi pengimplementasian kebijakan open access pada institutional repository di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim?
“Dari perpustakaan, ya sejak tahun 2010 itu Ya tahun 2010 itu Itu perpustakaan yang menginisiasi. Yang menginisiasi untuk memberikan open access itu pada saat itu pimpinan perpustakaan itu Pak Imron Rosyidi ya dengan berbagai masukan dari pustakawan gitu ya. Itu dan dari, menanggapi dari apa namanya, perkembangan di dunia. Terkait dengan open access itu, maka kemudian kita membuat repository secara mandiri begitu. Maksudnya membuat, membangun sendiri gitu ya. Namun dalam perjalanannya platform yang dibuat itu tidak kompatibel dengan Google Scholar, dengan index ya. Dengan index-index yang lain Sehingga kemudian kita menggunakan platform yang sudah banyak digunakan di perguruan tinggi Di dunia ya, ada dua namanya DSpace sama Eprint, kita milih, milih mana ini? Kenapa? Karena kemudian kita pilih Eprint”*
- *Mengapa memutuskan memilih platform Eprints?
“Struktur meta, struktur sistem informasinya ya. Saya kira itu lebih mudah dipahami ya. Lebih mudah dipahami, lebih mudah untuk memahami struktur atau taksonomi keilmuannya juga begitu.
Kemudian ini, metadatanya. Fitur-fiturnya maksud saya ya. Fitur-fiturnya itu lebih sesuai dengan pemahaman teman-teman di sini begitu. Di samping itu juga sudah banyak digunakan di Eropa. Jadi kalau Eprint itu lebih banyak di Eropa, DSpace itu lebih banyak di Amerika. Jadi semuanya itu dua kubu ya, waktu itu ya
Kita pilih yang Eropa dan juga melihat kustomisasi dan seterusnya itu lebih mudah di Eprint begitu. Itu sebagian pengetahuan saya ya. Jadi kemudian itu*

ya kita lakukan evaluasi. Dan hasil evaluasi itu kemudian kita tetapkan untuk penggunaan Eprint sebagai platform untuk repositorynya UIN Malang, dan itu kemudian di Indonesia paling banyak. Karena mungkin lebih sesuai dengan pemahaman teman-teman yang ada di Indonesia begitu. Daripada DSpace ya.”

- Apakah ketika transformasi dari platform mandiri kemudian ke Eprint pernah di uji coba ke pemustaka?

“Kita bikin pelatihan-pelatihan ya kita, kalau ke dosen kita bikin pelatihan ke dosen, memperkenalkan, mempromosikan, semuanya itu kita promosi kan. Kemudian ketika sudah jalan, waktu sudah berubah manajemennya dari unggah yang diunggah oleh petugas kemudian ke arah unggah mandiri Kita sediakan pelatihan. Artinya itu salah satu upaya kita untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa bagaimana mengunggah, menggunakan platform e-Theses itu”

- Apakah berarti kebijakan *open access* itu dikomunikasikan ke pemustaka?

“Nah iya itu kan ada semua pelatihan, kita sediakan mulai dari pelatihan unggah mandiri, kemudian pemanfaatan repository seperti apa, resources yang dimiliki oleh UIN Malang, perpustakaan ini semuanya kita sediakan dalam beberapa pelatihan yang diikuti secara rutin begitu. Tinggal mengakses di medsosnya perpustakaan. Nanti tanggal sekian ada pelatihan gitu dan seterusnya. Sudah lama dan kita satu tahun itu ya ratusan sesi. Untuk memberikan mempromote itu ya. Jadi kan mahasiswa baru masuk ya kita promote lagi untuk memperkenalkan bagaimana mengakses, bagaimana memanfaatkan ethesis itu tidak hanya sekedar sebagai arsip, tetapi bagaimana kemudian digunakan untuk melihat tren.

Ya tren riset yang ada di masing-masing prodi, tren riset yang ada di UIN Malang. Saya melihat kemampuan distingsi dari masing-masing universitas di Indonesia. Ada banyak prodi, tarbiyah yang di sini yang paling lama gitu misalnya dengan tarbiyah yang paling lama di Surabaya, Surabaya masih yang paling banyak gitu Itu misalnya kekuatannya di mana? Bahasa Arab di Malang itu kan seluruh Indonesia kan paling bagus, bahasa Arab. Tetapi

sekarang sudah banyak prodi-prodi bahasa Arab Itu kekuatannya di mana? Itu dengan melihat basis itu bisa, nggak sampai ke sana.”

- Apakah sudah terdapat SOP (*Standard Operation Procedure*) atau regulasi yang mengatur aksesnya?

“Ada, ada, kan ada itu, ketika nanti mau mengunggah itu sudah ada. Dan juga di website perpustakaan juga kita sediakan informasi ya, secara umum kemudian secara khusus nanti di pelatihan-pelatihan itu.

Dan termasuk juga kita, kemarin yang hasil anu sudah di upload mas, unggah mandiri itu mas, video. Saya nggak dikasih itu, sudah diselesaikan belum? Sudah selesai, baik, lalui saja. Masih-masih ini sih nggak ada kabar lagi. Masih revisi. Iya Itu kita juga sedang menyiapkan untuk versi tutorialnya secara dalam format video ya. Tapi prosedurnya itu sudah ada, nanti dibuka itu akan kelihatan Dan di dalamnya itu juga ada prosedurnya. Jadi prosedur secara step by step kita beri pertama panduannya ada. Jadi panduannya ada, panduannya di mana itu? Panduannya step by step Jadi nanti di klik, tanda tanya, maka akan muncul prosedur bagaimana penggunaan setiap ruas yang harus diisi itu harus seperti apa, ada panduannya.”

- Bagaimana respons pemustaka atas kebijakan *open access* ini?

*“Respons untuk kebijakan *open access* ya, ya secara kita belum, belum apa namanya, melakukan secara khusus ya. Tetapi karena itu menjadi kewajiban, ya sampai hari ini tidak ada yang merasa keberatan atau apa gitu ya, karena itu menjadi sebuah kewajiban yang harus diunggah begitu. Kalau masalah respons terkait dengan pentingnya itu, itu secara umum itu ya cukup tinggi ketika kita melakukan apa namanya, promosi melalui literasi informasi. Jadi setelah literasi informasi kita salah satunya adalah menyampaikan manfaat *ethesis* itu kayak apa. Sehingga mereka sangat apa namanya, antusias untuk datang, berkunjung, melihat karya-karya dari teman-teman angkatannya, kakak tingkat, misalnya jurusan perpustakaan nanti berapa nih sudah, ya mengunggah, jadi kan tidak perlu lagi harus datang ke perpustakaan, cari tercetaknya gitu ya, cukup melihat di *ethesis* sudah bisa. Dan akses tercetak itu karena sudah tidak ada versi tercetak, ya masih tetap tapi sangat rendah.*

Yang berada di lantai 2 itu mereka mengakses ya etesis gitu, mereka mengerjakan skripsi juga dengan mengakses etesis itu. Secara khusus belum, tapi secara ini mereka sangat antusias ya

Dan dari sisi aksesnya juga banyak gitu ya. Sekarang sudah ada 30, lihatlah nanti ya caranya itu di statistik ini sudah ada nih 30 ribu, 100% full text.”

- Apa dampak positif dari penerapan kebijakan *open access* di *institutional repository* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim?

*“Yang pertama yang jelas mempercepat perkembangan kajian keilmuan tertentu ya. Jadi mempercepat munculnya temuan-temuan baru. Jadi penyebaran keilmuan semakin cepat, otomatis temuan-temuan semakin cepat. Juga mempercepat produksi keilmuan, memproduksi keilmuan baru di bidang masing-masing tentunya. Kemudian mengurangi keberulangan riset, jadi misalnya karena sudah terarsip di situ *open access* semuanya, adik-adik tingkat tidak mungkin akan melakukan penelitian yang sama. Jadi mengurangi keberulangan riset sehingga memunculkan riset-riset baru dan mempercepat produksi temuan-temuan dalam bidang tertentu.*

*Publikasi ya, mempercepat publikasi. Sekarang itu publikasi, kalau dulu orang membuat karya itu cukup lama. Kalau menunjukkan skripsi bisa satu tahun baru skripsi ya, mungkin 6 bulan itu baru mendapatkan buku-bukunya. Tapi sekarang serba online mudah semua bisa *open access*, tidak ada yang ditutupi. Misalnya kalau mau fokus satu bulan setengah sudah selesai saya yakin. Jadi karena kemudahan itu yang dulunya harus mencari skripsi, di sana judulnya apa saja sekarang kan tinggal cukup di depan laptop bisa mencari di browser, segala macam. Jadi informasinya, bisa memudahkan untuk melihat tren, tren dari perkembangan keilmuan tertentu. Mengurangi keberulangan riset, dan mempercepat publikasi.”*

- Apa dampak negatif dari penerapan kebijakan *open access* di *institutional repository* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim?

“Open access itu sesungguhnya tidak ada dampaknya, yang ada itu positifnya. Orang menyebarkan ilmu itu masa ada dampaknya? Jelek gitu kan. Dampak positifnya 100% untuk kemakmuran, kesehatan umat manusia

Karena tulang punggung orang menjadi, orang yang menjadi sejahtera itu ya ilmu. Kalau dia keilmuannya semakin tinggi maka itu sejajar dengan kesejahteraan. Nah kalau misalnya sekarang sisi negatif, sisi negatif itu ada itu dari sisi individu yang tidak memahami apa itu open access. Batasan-batasan yang berkait dengan open access. Itu dalam konteks yang lain misalnya, bukan masalah etesis ya. Kalau masalah etesis 100% tidak ada negatifnya. Nah hanya ada itu tadi, pemahamannya harus matang. Mahasiswanya itu harus matang pemahaman terhadap riset. Contoh gitu mahasiswa mau meneliti maka harus paham etika riset, batasan-batasan etis, tidak etis, etika riset itu apa. Contoh misalnya data ini apakah saya buka? Apakah saya jelaskan secara detail di skripsi? Atau kemudian saya berikan nama samaran atau lain begitu. Itu etika riset yang mengaturnya ya. Kita harus mengikuti etika riset itu. Tetapi etesis sendiri itu tidak ada dampak negatifnya.

Nah open access yang di etesis ya karena ini persoalan yang berkait dengan pemahaman si researcher atau si peneliti. Mahasiswa sebagai peneliti, dosen sebagai peneliti Itu terkait dengan etika riset, itu sesuatu yang beda. Jadi jangan dimasukkan sebagai bagian dari open access, bukan. Tapi etika riset itu mau open access, mau close access. Etika riset itu sesuatu yang beda, jadi mahasiswa wajib memahami kalau mau riset ya harus tahu etika riset. Jangan sembrono. Etika riset kayak apa, plagiarisme itu sudah sesuatu yang berbeda. Jangan dicampur-adukan plagiarisme dengan open access. Jangan, itu tidak ada hubungannya. Open access itu semangat menyebarkan ilmu. Nah kalau kemudian ini ada plagiarisme, ini sesuatu yang melanggar etika riset. Ya sudah sesuatu yang berbeda. Jadi jangan dimasukkan. Oh jangan di-openkan karena nanti banyak yang plagiarisme. Ya sudah tidak usah meneliti. Maksudnya jangan dicampur-adukan dan jangan dijadikan sebagai dasar Bahwa plagiarisme ketakutan open access karena plagiarisme Nah plagiarisme itu perilaku individu. Jadi perilaku terhadap pelanggaran etika riset yang itu merupakan dosa besar. Nah itu kategori dosa besar di dunia akademik begitu. Dalam konteks ini dosa besarnya ya dosa besar maksudnya

bukan Ini ya, ya pokoknya pelanggaran berat begitu. Nah itu sudah diatur oleh peraturan Kemendikbud. Misalnya itu lihat berkait dengan plagiarisme, jadi ada plagiarisme pelanggaran berat maka gelarnya dicopot dan seterusnya. Nah itu tidak ada hubungannya dengan open access ini. Tidak ada hubungannya. Jangan kaitkan itu.

Artinya kalau yang lain ketakutan, ketakutan misalnya ada ketakutan oh dengan plagiarisme berarti ya risetnya dong itu. Ya mulai pembimbingannya itu ya risetnya harus ditantang.”

- Apakah dengan meningkatkan kualitas peneliti?

“Ya pemahamannya, kalau kualitas itu menurut saya bukan persamaan kualitas ya tapi kesadaran terhadap etika riset itu harus dari awal, misalnya saya meneliti tidak terlalu bagus tapi itu murni tulisan saya. Kan hasil sendiri, kan tak masalah, kan bagus. Daripada kelihatannya bagus tapi ternyata banyak plagiarisme. Nah itu dengan adanya open access ini sesungguhnya justru mendorong ya, mendorong apa? Orang untuk meneliti dengan benar ya. Kenapa? Kalau dia mau misalnya melakukan plagiarisme nanti akan ketangkap. Dengan adanya riset berulang kan tinggal gunakan nama lokasi, kemudian jadikan skripsi misalnya kan ketangkap itu. Artinya apa? Justru dengan open access itu, itu tadi, mencegah munculnya plagiarisme. Apalagi sekarang ada cek plagiarisme gitu ya. Yang secara cepat untuk mendeteksi itu. Kalau dulu secara manual di cek, nah sekarang sudah ada misalnya kayak Turnitin, identikit, dan sebagainya itu.”

- Apakah proses pengecekan dengan Turnitin ini dilakukan secara otomatis saat mengunggah karya ilmiah?

“Otomatis langsung.”

- Apa tantangan yang dihadapi ketika menerapkan kebijakan open access ini?

“Ya memang pertama itu memang kita bukan kesulitan, tapi tantangannya adalah pada pemahaman-pemahaman yang belum, belum apa istilahnya belum tepat terkait dengan open access begitu. Sehingga ada kekhawatiran, kekhawatiran nanti diplagiasi dan seterusnya begitu. Padahal justru dengan kita buka, maka orang lain akan takut melakukan plagiasi. Jadi mindsetnya

harus dibalik begitu. Kalau saya berikan secara cuma-cuma, semua orang bisa membaca, banyak orang yang membaca maka orang mau memplagiasi, pasti gak mungkin gitu kan, takut ya. Beda kalau kemudian kita tutup, malah justru akan memberikan ruang bagi plagiasi. Nah pemahaman-pemahaman kayak gitu pada awalnya memang itu tantangan. Tantangan yang cukup kuat di awalawalnya, tapi kemudian sekarang itu sudah tidak menjadi persoalan. Tidak menjadi sebuah tantangan begitu. Tapi justru tantangannya adalah bagaimana secara teknologi platform yang dikembangkan ini terus bisa sustainable. Kemudian bisa dikembangkan, tantangannya adalah mengembangkan platform ini, etesis itu bisa terindeks oleh berbagai platform indeks. Beberapa tempat database indeks juga sudah. Nah itu tantangannya adalah berkomunikasi antar platform. Bagaimana platform etesis itu berkomunikasi antar platform secara teknologi. Nah baru-baru ini kita dapatkan misalnya ke OATD. OATD itu sebuah database indeks open access basis disertasi di seluruh dunia. Itu ada sekitar 6 juta berapa lebih. Kita gabungkan di situ. Nah UIN Malang ini termasuk satu-satunya di Indonesia yang sudah bergabung. Artinya tantangan UIN Malang hari ini itu bukan persoalan pemahaman open access. Tetapi tantangannya adalah bagaimana platform atau etesis ini bisa berkomunikasi dengan platform-platform yang lain. Misalnya diindeks oleh OATD, kemudian diindeks oleh database indeks yang lain. Sehingga penyebarannya itu lebih maksimal, bisa diakses tidak lagi hanya dicari di satu tempat, tapi di berbagai indeks itu juga muncul.”

- Apakah ini berarti sudah ada upaya penanggulangan terhadap tantangan yang dihadapi?

“Kalau untuk penyadaran terhadap etika riset itu sejauh, itu namanya literasi informasi. Jadi di literasi informasi itu selalu kita berikan satu seksi, satu bab, satu topik terkait dengan memahami plagiarisme dan bagaimana menghindari plagiarisme. Itu kita berikan penjelasan secara singkat.”

- Bagaimana Kepala Perpustakaan memandang kebijakan open access di institutional repository UIN Malang?

“Ya, open access itu sejalan dengan semangat Islam ya. Jadi merupakan salah satu sarana untuk menyebarkan Islam itu juga bisa pemikiran-pemikiran intelektual muslim yang ada di sini. Terkait dengan kajian baik itu integrasi Islam dan Sains maupun murni itu bisa lebih banyak diakses oleh masyarakat global. Artinya ini memiliki posisi penting dalam rangka untuk meningkatkan visibilitas institusi Yang kedua visibilitas dosen dan yang paling utama adalah dakwah. Jadi bagian dari dakwah, bagian dari siar Karena banyak karyakarya terkait dengan keislaman, integrasi Islam dan Sain itu Dari kajiankajian itu biar bisa lebih banyak dibaca oleh masyarakat global. Tidak hanya kalangan muslim tetapi non muslim yang mau mempelajari Islam bisa dari hasil risetnya mahasiswa dan dosen. Nah ini harus diberikan ruang, jadi open access ini dia memberikan visibilitas universitas, memberikan dampak pada peningkatan memahami, mengenal UIN Malang juga mengenal secara individu para pendidiknya, mahasiswa, dosen gitu ya. Itu yang penting sehingga ini akan tetap menjadi satu layanan yang terus ditingkatkan. Salah satu contoh misalnya kemarin ada mahasiswa dicari oleh perusahaan. Jadi hasil risetnya karena bisa dibaca oleh publik, dibaca oleh orang-orang perusahaan. Sehingga menelepon perpustakaan ingin tanya terkait dengan si penulisnya. Si penulisnya ini dicari karena karyanya itu buat mereka itu bisa meningkatkan eksistensi perusahaan. Hasil penelitiannya itu mau dikembangkan Yang kedua, dengan penelitian itu juga bisa menjadi penyelesaian kasus. Baru-baru ini, kemarin Polda Jatim juga menghubungi BAK UIN ya. Kemudian saya ditelepon ke BAK UIN, ke tempatan yang menerima itu Pak Dekan Tarbiyah, kemudian Pak Dekan itu menelepon saya untuk mencarikan skripsi ini karena skripsi itu akan dijadikan sebagai alat bukti untuk menyelesaikan masalah.

Nah, kenapa? Karena Polda Jatim membaca skripsi itu. Jadi terkait dengan penelitian skripsi ini, penelitian terkait dengan sebuah yayasan misalnya. Nah, yayasannya itu sedang ada masalah jadi penelitian itu menjadi dasar, menjadi bagian dari untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini manfaatnya luar

biasa. Bisa menyelesaikan masalah, bisa meningkatkan ilmuwan, juga meningkatkan sebuah pendidikan.

Misalnya dengan perusahaan tadi, perusahaan jamu, kalau nggak salah Jamu Jago ya itu kalau kemudian hasil karya mahasiswa ini, penelitian ini dikembangkan di situ. Otomatis di situ semakin produknya semakin banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Otomatis meningkatkan apa? Menyerap tenaga kerja banyak. Iya kan? Nah itu jadi kalau, ya sudah, sudah jelas memang kita nggak boleh kemudian bertentangan dengan semangat Islam. Jadi kita nggak boleh khitman, tapi kita harus tabligh, jadi akan ada tabligh. Apa? Kita harus, integritasnya harus kuat, kita harus tabligh open access, bagian dari itu. Kita nggak boleh khitman, ilmu disembunyikan nggak boleh. Ngapain juga? Toh, mahasiswa kalau saya meneliti selama satu tahun, dua tahun. Kan adanya protes kemarin misalnya, waktu, bukan protes ya, tapi menanyakan ke perpustakaan. Pak, kenapa karya saya kok belum masuk ya? Nah itu pada tahun 2010 sampai tahun 2020 karena kan dimasukkan oleh petugas. Karena dimasukkan oleh petugas, antara yang lulus dan yang diunggah itu tidak sampai selesai, dikatakanlah 70 sampai 80. Ada antara 20 persen yang belum terunggah setiap tahun. Nah ini, si mahasiswa itu termasuk yang 20 persen itu, sehingga Pak, menelepon dan kemudian diunggah. Nah PR sekarang ini, karena kebijakan tahun 2020 itu seperti itu, nggak mandiri.

Jadi, skripsi yang belum sempat terunggah, yang menjadi PR dari mulai tahun 2000 sekian itu kita mulai unggah semua sekarang, jadi nanti mulai tahun 2000, di bawah 2020 itu juga akan terunggah. Jadi semua akan kita unggah, jadi nanti kalau sudah mau ada mahasiswa lulus ini mencari skripsinya.”

Lampiran 3

**Transkrip Wawancara HASIL WAWANCARA QS, MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
28 SEPTEMBER 2023**

- Apakah Anda pernah menggunakan *institutional repository/e-Theses* milik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim?
Ya, pernah untuk tugas akhir.
- Apakah Anda mengetahui bahwa *institutional repository* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim bisa diakses dengan bebas atau *open access*?
Awalnya nggak tahu, karena baru buka repositorynya pas sudah semester akhir saja. dan ternyata banyak banget yang bisa dibikin contoh dari skripsi kakak tingkat sebelumnya.
- Menurut Anda, apakah ada dampak baik dari penerapan kebijakan *open access* pada *institutional repository* ini?
Dampak baiknya banyak banget, karena sebelum kita bikin judul skripsi kita bisa ngerti pandangannya mau ngambil tema apa skripsinya. Terus dari bab 3nya juga full ya jadi lebih memudahkan. Kalo dari buku kan kurang detail ya, gak selengkap dari skripsi. Terus kan nyambung juga sama bab 4 dan 5 jadi bisa dimanfaatkan dengan baik.
- Apakah ada dampak buruknya dari penerapan kebijakan *open access* pada *institutional repository* ini?
Ada sih dampak buruknya, Cuma orang kan beda-beda ya ada yang benarbenar copy dan tidak berusaha sendiri.

Lampiran 4

Transkrip Wawancara

HASIL WAWANCARA AD, MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

28 SEPTEMBER 2023

- Apakah Anda pernah menggunakan *institutional repository/e-Theses* milik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim?

Ya, pernah.

- Apakah Anda mengetahui bahwa *institutional repository* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim bisa diakses dengan bebas atau *open access*?

Ya, tahu. File-file yang ada dalam institutional repositorynya atau websitenya itu gak dikunci. Jadi kita bisa download secara bebas dan free atau gratis begitu. Kan ada beberapa universitas yang repositorynya itu dikunci. Jadi kita harus minta akses itu kan agak ribet kan, jadi kayak kita harus minta tolong ke mahasiswa sananya lah atau apalah. Malah kadang itu ada universitas yang membayar kan (koleksi) institutional repositorynya.

- Menurut Anda, apakah ada dampak baik dari penerapan kebijakan *open access* pada *institutional repository* ini?

Sebagai mahasiswa apalagi yang sedang skripsi-an itu ya sangat membantu sih, soalnya ya pasti kayak (butuh) banyak referensi skripsi-skripsi orang-orang terdahulu juga. Pokoknya membantu banget lah, gak perlu buat akun lah, atau minta tolong mahasiswa kampus lain lah atau minta akses ke adminnya dan segala macam. Bisa langsung di download gratis begitu, gak ribet.

- Apakah ada dampak buruknya dari penerapan kebijakan *open access* pada *institutional repository* ini?

Pasti ada sih, lebih rentan kena plagiasi atau copas (copy paste). Karena saking mudahnya (akses) jadi banyak disalahgunakan, asal copas saja, jadi (tingkat) plagiasinya pasti tinggi.